



MAJALAH

# Parlementaria

## Mengulik Mudik 2023



EDISI 221  
TH. 2023



7 25272 73070 6



# Parlementaria

**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI

**KETUA PENGARAH**

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**PIMPINAN PELAKSANA**

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

**W.K PIMPINAN REDAKSI**

Rizka Arinindya, S.Sos (Kasubag Media Cetak dan Website)

Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

**REDAKTUR**

Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

**REDAKTUR FOTO**

M. Andri Nurdiansyah

**SEKRETARIS REDAKSI**

Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,  
Andi Nurul Naual Ramadhina, A.Md.Ds

**ANGGOTA REDAKSI**

Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbari, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

**FOTOGRAFER**

Naefuroji, Jaka Nugraha, Devi Iriandi, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

**ANALIS MEDIA**

Supian, S.E, Natasya Arnanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widjowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

**INFOGRAFIS**

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

**ADMINISTRASI**

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

**PENERBITAN**

**PIMPINAN PENERBITAN**

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

**DESAIN GRAFIS**

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

**IT MEDIA DIGITAL**

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**

Eny Sulistiowati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Ria Damayanti

**ADMINISTRASI**

**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL  
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

## LAPORAN UTAMA



# Mengulik Mudik 2023

4

**4 PROLOG**  
**Mengulik Mudik 2023**

**8 LAPORAN UTAMA**

- Mengapresiasi Penyelenggaraan Arus Mudik 2023
- Melihat Perputaran Ekonomi Kala Mudik
- Mimpinya Nyata Mudik Lebaran 2023

**16 SUMBANG SARAN**  
**Mudik 2023: Mudik Lancar dan Berkeselamatan**

**18 PENGAWASAN**  
**Mengatasi KKB Dengan Desain Komprehensif**

**20 ANGGARAN**  
**Cetak Sejarah, BUMN Sumbang Dividen Rp80,2 Triliun**

**22 LEGISLASI**  
**RUU Perampasan Aset:  
Menekan Kejahatan TPPU**

**24 FOTO BERITA**

**28 FOTO STORY**  
**Buruh di May Day 2023**

**30 PROFIL**  
**Rifqinizamy Karsayuda  
Anak Guru SD yang Melenggang ke Senayan**

**34 KUNKER**



**PENGAWASAN**

Mengatasi KKB  
Dengan Desain  
Komprehensif

18

**ANGGARAN**

Cetak Sejarah,  
BUMN  
Sumbang  
Dividen  
Rp80,2 Triliun

20

**LEGISLASI**

RUU  
Perampasan  
Aset:  
Menekan  
Kejahatan  
TPPU

22

- 56** **SOROTAN**  
Mengantisipasi Cuaca Ekstrem
- 58** **LIPUTAN KHUSUS**  
Pesan Humanis dari KTT ASEAN ke-42
- 60** **DAPIL**
- 70** **TOKOH**  
**HANNA AMEERA**  
Sang Pencerita Lintas Medium
- 72** **PERNIK**
  - Setjen DPR RI Raih Predikat Sangat Baik Indeks Kinerja Anggaran
  - DPR RI-Parlemen Amerika Dukung Peningkatan Regulasi Tata Kelola Lingkungan
- 74** **KIAT SEHAT**  
Mencegah *Burnout* di Tempat Kerja
- 76** **WISATA**  
Jelajah Sumatera Barat (2)  
Ziarah Saksi Revolusi dan Kejayaan Tanah Andalas
- 78** **HOBİ**  
**ADIAN NAPITUPULU**  
Gemar Modifikasi Motor Tua
- 79** **POJOK PARLE**  
Marketplace Guru

SCAN QR  
UNTUK BERITA TERKINI  
SEPUTAR DPR RI



Ikuti Akun Media Sosial DPR RI  
Follow, Like & Subscribe

medsos@dpr.go.id



DPR RI



@DPR\_RI



@DPR\_RI



DPR RI

w w w . d p r . g o . i d

# Mengulik Mudik 2023

Mudik 2023 serasa 'pucuk dicinta ulam pun tiba'. Bermimpi sambil menabung kesabaran untuk bertemu dengan keluarga dan sanak saudara yang dikasihi terjawab jadi nyata. Inilah musim mudik perdana pasca-pandemi.





Pada tahun 2023, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa masyarakat Indonesia secara leluasa bisa pulang

ke kampung halaman. Segenap DPR menyambut baik kebijakan tersebut. Mengawal tanpa henti hingga mudik selesai, DPR, melalui alat kelengkapan dewan yang berwenang, menyampaikan sejumlah catatan sekaligus apresiasi.

Membidangi infrastruktur dan perhubungan, Komisi V DPR menilai infrastruktur pendukung mudik memberikan banyak pilihan alternatif bagi masyarakat yang ingin menuju kampung halaman tercinta. Patut dirayakan, tentunya. Mengapa? Mudik 2023 tingkat kecelakaan lalu lintas signifikan menurun.

Terbukti, dibandingkan dengan angka kecelakaan tahun 2022, yang tercatat 7.633 kasus, dengan korban jiwa sebanyak 1.121 orang. Tahun 2023, kasus kecelakaan turun hingga 5.894 kasus, di mana sebanyak 726 menimbulkan korban jiwa. Di sisi lain, dengan keterbukaan informasi, masyarakat Indonesia maupun pelaksana penanganan mudik tahun ini menjadi lebih mawas diri.

Walaupun begitu, kita tahu bahwa hanya Tuhan yang sempurna, bukan manusia. Sebab itu, Komisi V DPR meminta pemerintah mengevaluasi diri karena masih



**Evaluasi harus menyeluruh. Jadi, jangan seperti pemadam kebakaran, bekerja kalau sudah ada musibah, padahal sesuatu bisa diantisipasi. Kenapa tiap tahun masih terjadi seperti ini**

ditemukan sejumlah titik kemacetan yang sulit diurai. "Evaluasi harus menyeluruh. Jadi, jangan seperti pemadam kebakaran, bekerja kalau sudah ada musibah, padahal sesuatu bisa diantisipasi. Kenapa tiap tahun masih terjadi seperti ini," tegas Ketua Komisi V DPR Lasarus.

Di sisi lain, Komisi VI DPR yang membidangi sektor industri, investasi, dan persaingan usaha juga turut mengawasi pelaksanaan mudik 2023. Sebagai komisi yang memiliki mayoritas mitra kerja adalah BUMN, Komisi VI DPR mendukung terciptanya mudik yang kondusif, aman, dan tertib.

"Secara umum saya melihat gelombang arus mudik maupun arus balik saat libur lebaran tahun ini berjalan baik. Hal ini tidak lepas dari kinerja BUMN bekerja sama dengan pihak terkait sehingga semua bisa berjalan lancar," ungkap Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Y Manurung.

Selain itu, Komisi VI DPR menyampaikan bahwa stok pangan telah terkendali dan digitalisasi juga mempercepat implementasi solusi guna menekan kasus percaloan

tiket. Sehingga, Komisi VI DPR mengapresiasi BUMN transportasi, BUMN energi, serta BUMN pendukung yang mengusahakan arus mudik pada momen Hari Raya Idulfitri 1444 H terlaksana mendekati harapan.

Terakhir, Komisi XI, memberikan catatan yang komprehensif. Melalui Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad. Ia mengatakan, masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama yang harus dikerjakan oleh Pemerintah Indonesia. Seperti, Kementerian UMKM, Koperasi, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif belum dilibatkan penuh, sehingga potensi ekonomi akibat mudik 2023 belum termanfaatkan penuh.

Dirinya berharap, pada mudik mendatang, daya beli masyarakat dari kota ke desa diberdayakan sebaik-baiknya. Sehingga, perputaran ekonomi lokal berputar dengan kencang agar jadi pemantik untuk mengimbangi kecepatan dinamika global. **— tim laput/mh**



**Secara umum saya melihat gelombang arus mudik maupun arus balik saat libur lebaran tahun ini berjalan baik. Hal ini tidak lepas dari kinerja BUMN bekerja sama dengan pihak terkait sehingga semua bisa berjalan lancar**

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut mudik Lebaran 2023 merupakan paling tinggi dalam sejarah. Pemerintah memprediksi ada 123 juta orang melaksanakan perjalanan mudik di momen Idul Fitri tahun ini.

Data Korlantas di Posko Angkutan Lebaran Terpadu, per 15 – 23 April atau H – 7 hingga H + 1 lebaran tercatat kecelakaan lalu lintas 2.557 kejadian. Jumlah ini menurun 33 persen dari periode yang sama pada 2022.

Sementara korban meninggal mencapai 329 orang. Jumlah tersebut turun hingga 61 persen dibandingkan musim mudik lebaran tahun 2022.

# PREDIKSI PERGERAKAN 123 JUTA ORANG SAAT MUSIM MUDIK LEBARAN 2023

Prediksi pergerakan 123,8 juta orang saat musim mudik lebaran 2023, meningkat 14,2% dibandingkan prediksi 2022 sebesar 85,5 juta orang.

**123,8 juta**

Pergerakan masyarakat diprediksi didominasi dari Pulau Jawa: 62,5% atau 77,3 juta orang.

Puncak Arus Mudik pada H-1 (21 April 2023) & Meningkat Sejak H-3 (19 April 2023)

Puncak Arus Balik pada H+2 (25 April 2023) & Masih Tinggi hingga H+3 (26 April 2023)

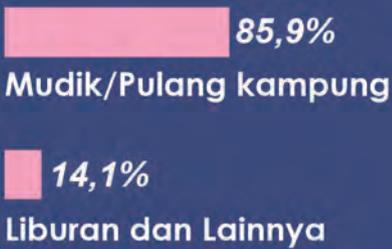




Foto: Jaka



### Alasan Bepergian



### Jumlah Pemudik



### Faktor yang Mempengaruhi Mudik



### Moda Transportasi



Mobil Pribadi  
27,32 juta



Sepeda Motor  
25,13 juta



Bus  
22,77 juta



Kereta Api  
14,47 juta



Mobil Sewa  
9,53 juta



Angkutan  
Penyeberangan  
6,67 juta



Pesawat Terbang  
6,19 juta



Angkutan Laut  
1,66 juta

# Mengapresiasi Penyelenggaraan Arus Mudik 2023

Mudik. Satu kata terlintas yang tak mungkin terlewatkan usai satu bulan lamanya menjalani ibadah puasa secara khusyuk. Hiruk pikuk nan gegap gempita menyambut Lebaran 2023 ini sangat terasa atmosfernya jika dibandingkan suasana tiga tahun belakangan ini, kala masa pandemi Covid-19. Kerinduan kepada sanak saudara keluarga nun jauh di sana tak lagi terbendung usai masa pandemi melandai.



FOTO: KRESNO/NR

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani.



Tak dinyana, melonjaknya arus mudik dan arus balik lebaran di luar dugaan berjalan cukup lancar. Kinerja pemerintah di balik kelancaran

penyelenggaraan arus mudik dan balik pada Lebaran Idulfitri

2023 diapresiasi secara langsung oleh banyak pihak. Salah satunya, apresiasi datang dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam Rapat Paripurna DPR RI, pertengahan Mei lalu, Puan mengapresiasi kinerja pemerintah serta seluruh pekerja sosial yang turun tangan dalam kelancaran mudik tahun ini.

## Kecelakaan Minim Terjadi

*Parlementaria* pada awal Mei lalu,

menerima rilis dari Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady yang mengapresiasi kinerja pemerintah pada pelaksanaan arus mudik dan balik Idulfitri 2023. Arus mudik dan balik Lebaran 2023 dinilainya telah berlangsung aman, lancar, tertib, dan yang terpenting minim kecelakaan.

Segegap *stakeholder* yang terlibat dalam penanganan arus mudik dan arus balik dinilai legislator Fraksi Partai Golkar ini sukses



FOTO: ARIEF/NR

Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady

melakukan berbagai rekayasa lalu lintas untuk menghindari kemacetan parah di berbagai ruas jalan tol maupun jalur arteri. Apresiasi khususnya disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, PUPR, Kepolisian, dan pihak-pihak yang terlibat menyukseskan mudik tahun ini yang terbilang lancar dan minim hambatan.

Termasuk, ditopang dengan

infrastruktur yang memadai sehingga banyak pilihan alternatif bagi masyarakat untuk sampai ke kampung halaman. Berdasarkan data, angka kecelakaan lalu lintas selama arus mudik dan balik Lebaran 2023 mencapai 189 jiwa, jauh menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 310 orang. Tahun ini, tercatat ada sekitar 123 juta warga yang melakukan mudik ke kampung

halaman.

### Apresiasi Mudik Lancar

Senada, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi kepada semua pihak terkait atas sukses pelaksanaan mudik Lebaran 2023. Dengan jumlah pemudik yang mengalami peningkatan cukup drastis, pemerintah dinilai mampu mengelola dan berkoordinasi dengan sangat luar biasa.

"Tentu yang pertama, saya mengungkapkan apresiasi kepada semua pihak terkait atas kerja dan upayanya dalam memastikan pelaksanaan mudik kemarin berjalan aman dan lancar, baik kepada Kementerian PUPR yang telah memastikan secara baik infrastruktur jalan yang dilalui pemudik, Kementerian Perhubungan dan Kakorlantas, sudah cukup sangat baik hingga peran Basarnas dan BMKG yang telah ikut berpartisipasi," kata Novita dalam keterangannya,

“

**Mengapresiasi kinerja pemerintah pada pelaksanaan arus mudik dan balik Idulfitri 2023. Arus mudik dan balik Lebaran 2023 dinilainya telah berlangsung aman, lancar, tertib, dan yang terpenting minim kecelakaan.**

Hamka Baco Kady  
Anggota Komisi V DPR RI

pertengahan Mei lalu.

Tak hanya itu, politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga bersyukur, ada penurunan pada tingkat kecelakaan lalu lintas di musim mudik kemarin. Berdasarkan data dari kepolisian selama musim mudik Lebaran 2023 mencapai 5.894 kasus, sebanyak 726 diantaranya menimbulkan korban jiwa.

Jumlah tersebut, turun dari angka kecelakaan tahun 2022, yang tercatat 7.633 kasus, dengan korban jiwa sebanyak 1.121 orang. "Penurunan data kasus kecelakaan dan korban jiwa ini, tentu penting dan tetap menjadi bahan catatan evaluasi bagi semua pihak, meski terjadi penurunan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas lebaran," sebut Novita.

Dengan keterbukaan informasi tersebut, diharapkan akan membuat masyarakat maupun pelaksana penanganan mudik di tahun depan akan lebih mawas diri. "Bagi masyarakat tentu data ini menjadi kepentingan bagi mereka untuk terus mawas diri. Bagi pemerintah, tentunya harus menjadi acuan agar tingkat kecelakaan lalu lintas pada musim mudik mendatang semakin menurun," pungkash legislator Dapil Banyumas-Cilacap,



FOTO: ARIEF/NR

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti.

Jawa Tengah tersebut.

Tak ketinggalan, kinerja Korlantas Polri di bawah komando Kapolri Listyo Sigit Prabowo juga diapresiasi Komisi V DPR RI lantaran arus mudik 2023 bisa berjalan lancar. Menurut Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi, April lalu, Polri berhasil

mengamankan arus mudik di titik-titik tertentu termasuk tata kelola lalu lintas di seluruh Indonesia yang dinilainya berjalan tanpa hambatan signifikan.

Komisi V DPR RI diungkapkannya, selalu melakukan rapat antisipasi dan evaluasi saat hari-hari besar. Dalam rapat itu, Polri memberikan laporan terkait pengamanan lalu lintas. Demikian halnya, Komisi V juga menggelar rapat rutin bersama antara Menhub, Menteri PUPR, Dirjen Bina Marga, BPJT termasuk dalam hal ini Kakorlantas Polri memberikan laporan-laporan persiapan arus mudik dan arus balik lebaran.

## Evaluasi Titik Kemacetan

Meski begitu, Mulyadi berharap, jalur-jalur tertentu khususnya jalur Puncak juga menjadi evaluasi Polri pada mudik tahun ini. Mengingat, Puncak merupakan titik penting karena selalu terjadi kemacetan. Padahal, sudah jauh-jauh hari telah diingatkannya kepada segenap *stakeholder* terkait bahwa Puncak

“

**Tentu yang pertama, saya mengungkapkan apresiasi kepada semua pihak terkait atas kerja dan upayanya dalam memastikan pelaksanaan mudik kemarin berjalan aman dan lancar, baik kepada Kementerian PUPR yang telah memastikan secara baik infrastruktur jalan yang dilalui pemudik, Kementerian Perhubungan dan Kakorlantas, sudah cukup sangat baik hingga peran Basarnas dan BMKG yang telah ikut berpartisipasi**

Novita Wijayanti.  
Anggota Komisi V DPR RI

“

Penurunan data kasus kecelakaan dan korban jiwa ini, tentu penting dan tetap menjadi bahan catatan evaluasi bagi semua pihak, meski terjadi penurunan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas lebaran

Novita Wijayanti,  
Anggota Komisi V DPR RI



FOTO: ARIEF/NR

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

bukan hanya sebagai jalur lintasan. Akan tetapi, Puncak sudah jadi destinasi nasional, bahkan wisatawan asing internasional.

Tak hanya itu, sorotan tajam tertuju saat masyarakat hendak menyeberang dari Pelabuhan Merak, Banten ke Bakauheni, Lampung pada puncak mudik 28-29 April lalu. Menyoroti hal itu, Komisi V DPR RI selaku mitra kerja Kementerian Perhubungan

menyatakan, seharusnya Kementerian Perhubungan sudah bisa memprediksi lonjakan pemudik, mengingat masyarakat sudah lebih dari dua tahun diminta tidak pulang kampung, sehingga tahun ini menjadi kesempatan untuk mudik.

Terkait hal itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Kementerian Perhubungan langsung berbenah, agar kekecewaan pemudik tidak terulang saat arus balik usai lebaran

nanti. "Seharusnya pemerintah prediksi, daya tampung berapa, ketersediaan kapal berapa, kalau yang menyebrang sekian ribu daya tampung cukup tidak. Arus balik nanti jangan sampai terulang kasus kemarin. Kan, sudah terukur berapa jumlah pemudiknya, harus bisa diantisipasi," seru Lasarus.  pun/mh

“

Seharusnya pemerintah prediksi, daya tampung berapa, ketersediaan kapal berapa, kalau yang menyebrang sekian ribu daya tampung cukup tidak. Arus balik nanti jangan sampai terulang kasus kemarin. Kan, sudah terukur berapa jumlah pemudiknya, harus bisa diantisipasi

Lasarus  
Ketua Komisi V DPR RI



FOTO: ARIEF/NR

Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi.

# Melihat Perputaran Ekonomi Kala Mudik

Musim mudik selalu meninggalkan jejak sukses dan gagal, jejak bahagia dan duka. Angka-angka kemacetan, kecelakaan, kelancaran arus, dan jumlah pemudik selalu muncul. Banyak kementerian/lembaga juga yang terlibat menyusun rencana arus mudik dan balik. Tapi, soal perputaran ekonomi di balik tradisi mudik belum sepenuhnya terekspos.



FOTO: MUNICHEN/IR

Anggota Komisi XI DPR RI Kamussamad.



Selama ini kementerian/lembaga yang langganan terlibat pada pengaturan arus mudik dan balik tahunan adalah Kementerian

Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Kepolisian RI. Ke depan Kementerian Koperasi UMKM dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif perlu dilibatkan dalam menyusun arus balik lebaran. Ini menyangkut perputaran ekonomi yang sangat tinggi setiap kali tradisi ini berlangsung.

Adalah Anggota Komisi XI DPR RI Kamussamad yang menyerukan

agar perencanaan dan evaluasi mudik melibatkan dua kementerian tersebut. Menurutnya, ada empat hal yang menjadi bahan evaluasi, yakni aspek ekonomi, sosial, keamanan, dan budaya. Ia menyebut, dari segi perputaran ekonomi terjadi redistribusi aset dan retribusi ekonomi dari kota ke desa, juga dari kota ke

kampung, baik yang berpenghasilan rendah, menengah, maupun yang besar.

"Diperkirakan perputaran uang khusus untuk mudik kemarin sebanyak Rp280 triliun. Itu artinya, kalau kita lihat lebih kurang seperempat dari APBN kita dan itu tentu saja menggerakkan ekonomi,"



**Diperkirakan perputaran uang khusus untuk mudik kemarin sebanyak Rp280 triliun. Itu artinya, kalau kita lihat lebih kurang seperempat dari APBN kita dan itu tentu saja menggerakkan ekonomi,**

kata Kamrussamad dalam diskusi bertema "Evaluasi Mudik 2023," di Gedung Parlemen, Jakarta.

Hal lain yang menjadi sorotan Kamrussamad adalah belum dilibatkannya Kementerian UMKM, Koperasi dan Kemenparekraf. Mengingat, mudik lebaran berdampak pada ekonomi masyarakat. Namun, dua kementerian tersebut belum terlibat mendukung hajatan tahunan itu. Padahal, perputaran dana pada mudik 2023 dibanding 2019 lebih tinggi.

Pada musim mudik, daya beli masyarakat yang tinggi memantik perputaran ekonomi lokal yang juga tinggi. "Inilah yang saya ingin berikan catatan, pandangan bahwa seharusnya kementerian yang membidangi UMKM koperasi juga ekonomi kreatif dan pariwisata dilibatkan dalam tim persiapan mudik. Sehingga, sirkulasi ekonomi dan produk kita betul-betul menjadi bagian dari budaya mudik," terangnya.

Kemudian aspek sosial, angka kecelakaan dan korban meninggal dunia mengalami penurunan. Ia menyebut penurunan orang meninggal dunia mencapai 37 persen. "Penurunan yang meninggal memang mencapai 37 persen lebih. Di tahun ini turun menjadi 189 keluarga yang kehilangan keluarga akibat kecelakaan mudik ini," ungkapnya.



FOTO: MUNICHEN/IR

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad.

Aspek ketiga, keamanan. Menurutnya, keamanan dan kenyamanan memang jauh lebih baik di 2023 ini. Tingkat kenyamanan ditunjukkan dengan pembangunan infrastruktur. "Kenyamanannya terlihat dari tingkat kemacetan, berapa lama jarak tempuhnya yang tadinya bisa 36 jam sekarang bisa 11 jam sampai di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur misalnya," ungkap dia lagi.

Selain infrastruktur, politisi Fraksi Gerindra ini juga mengapresiasi sinergitas Polri dan Kemenhub dalam memberikan satu layanan yang baik. "Jadi, aspek ini kami memberi

rasa hormat kepada seluruh jajaran pemerintah yang mampu mencegah, sehingga tingkat kenyamanannya jauh lebih baik," bebernya.

Selanjutnya, Kamrussamad menyorot aspek budaya. Mudik sangat penting dan harus dipertahankan sebagai bagian dari budaya Indonesia. "Ini adalah tradisi yang harus menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Mudik ini bagian dari budaya yang harus dipertahankan, karena bukan hanya menggerakkan ekonomi sektor riil tetapi juga mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kampung," katanya.

Karena itu, lanjut Kamrussamad, DPR selama ini memberikan dukungan penuh di alokasi pembangunan infrastruktur, karena konektivitas bisa melahirkan daya saing ekonomi. Dirinya berharap, apa yang sudah dilakukan pemerintah pada mudik Lebaran 2023 ini, mampu dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang. "Angka kecelakaan dan korban menurun, ekonomi sosial, keamanan dan budaya bisa meningkat," tutup politisi dapil Jakarta III itu. — ann/mh

“

**Ini adalah tradisi yang harus menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Mudik ini bagian dari budaya yang harus dipertahankan, karena bukan hanya menggerakkan ekonomi sektor riil tetapi juga mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kampung,**

**Kamrussamad**  
Anggota Komisi XI DPR RI

# Mimpi Nyata Mudik Lebaran 2023

Tiga tahun sudah, pandemi Covid-19 terlewati. Situasi ini membuat masyarakat Indonesia sangat menantikan 'ritual' tatap muka dengan keluarga sekaligus sanak saudara. Sebab itu, seluruh elemen pemerintah berusaha mewujudkan mudik Hari Raya Idulfitri terlaksana kondusif, aman, dan tertib.



Mendukung usaha tersebut, Komisi VI DPR mengapresiasi kinerja para mitra kerja yang telah membuat mimpi jadi nyata untuk para perantau pulang

ke kampung halaman. Usai fase arus mudik dan arus balik, saat libur Hari Raya Idulfitri 1444 H/2023 M selesai, Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Y Manurung mengapresiasi kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Baginya, ada beberapa faktor yang perlu disoroti untuk menentukan kelancaran mudik ini.

Salah satu yang disoroti adalah perkembangan pembangunan jalan Tol Cisumdawu serta evaluasi kinerja BUMN di wilayah Provinsi Jawa Barat. Cukup memuaskan, menjadi kata yang mewakili dampak pembangunan tol terhadap arus mudik dan arus balik, termasuk Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan.

"Secara umum saya melihat gelombang arus mudik maupun arus balik saat libur lebaran tahun ini berjalan baik. Hal ini tidak lepas dari kinerja BUMN bekerja sama dengan pihak terkait, sehingga semua bisa berjalan lancar," ungkap Martin usai memimpin agenda evaluasi dengan perwakilan Kementerian BUMN dan 7 BUMN bidang Karya di Bandung, Jawa Barat, awal Mei lalu.



FOTO: OLI/NR

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemhub), pergerakan kendaraan pada arus mudik dan balik Lebaran 2023 didominasi oleh kendaraan pribadi melalui jalur darat. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat pergerakan mobil angkutan yang melewati tol dan arteri pada 2023 mencapai 9,97 juta pergerakan, naik 175,56 persen dibandingkan dengan periode arus mudik dan balik Lebaran 2022 yang mencapai 3,59 juta pergerakan.

Sebelumnya, pada Desember 2022 lalu, jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) Seksi 4-Seksi 6 (Cimalaka-Dawuan) sepanjang 29,3 km sudah berfungsi

digunakan. Lalu, Tol Cisumdawu seksi 1-3 dari Cileunyi ke Cimalaka sepanjang 32,5 km telah beroperasi untuk arus mudik dan arus balik Lebaran 2023. Dengan dibukanya Tol Cisumdawu sebagai jalur mudik Lebaran 2023, maka pengendara dari arah Cileunyi, Bandung bisa langsung tembus sampai ke Kertajati, Majalengka.

Dalam agenda evaluasi tersebut, Komisi VI DPR mengapresiasi jajaran perwakilan dari Kementerian BUMN, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tbk, Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero), Direktur

Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

## Stok Pangan Aman

Dengan melonjaknya permintaan pangan untuk Hari Raya Idulfitri, Komisi VI DPR menilai mitra kerja Komisi VI DPR telah siap mengamankan ketersediaan stok pangan. Oleh karena itu, Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan mengapresiasi ketersediaan stok pangan, distribusi dan stabilisasi harga pangan pada Hari Raya Idulfitri 1444 H yang berjalan dengan kondusif.

Pernyataan tersebut ia sampaikan usai mengikuti agenda evaluasi bersama dengan sejumlah BUMN di Kota Surabaya pada awal Mei lalu. Meski masih terdapat sejumlah catatan akibat ada persoalan distribusi di beberapa lokasi, tetapi ia menilai sudah berjalan baik dan sukses terkait ketersediaan stok pangan di momen lebaran tahun 2023 ini.

"Kita harapkan ke depan untuk persiapan Iduladha dan persiapan



FOTO: OJ/ NR

Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Y Manurung.

Natal dan tahun baru nantinya tentu bisa lebih baik lagi. Saya juga berharap semua *stakeholder* terkait bisa menjaga sinergitas guna memaksimalkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat tentunya dalam hal ini kebutuhan pangan, stok, harga, dan kualitasnya bisa benar-benar terjamin. Itu tentunya menjadi harapan masyarakat," tuturnya.

## Digitalisasi Tiket Mudik

Akselerasi penerapan digitalisasi menjadi salah satu faktor

turut berperan penting dalam menyukseskan arus mudik lebaran tahun 2023. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji usai memimpin evaluasi BUMN transportasi dan BUMN energi serta BUMN pendukung pada Hari Raya Idulfitri 1444 H di Surabaya, Jawa Timur.

"Dari hasil evaluasi, dengan adanya penerapan sistem digitalisasi menambah kelancaran yang luar biasa. Misal di ASDP, dengan adanya aplikasi membuat pemesanan tiket kapal ferry menjadi lebih tertib, lebih rapi, dan yang paling penting juga menghindari calo, sehingga konsumen tidak dirugikan," ungkap Sarmuji.

Tentu saja, lanjutnya, tidak dapat dipungkiri keberadaan calo tidak akan luput hadir bersamaan dengan momen-momen krusial seperti momen Hari Raya Idulfitri. Namun, Sarmuji tetap yakin penerapan digitalisasi sedikit demi sedikit akan menekan keberadaan calo. "Karena dengan aplikasi orang-orang tidak perlu lagi antri di pelabuhan berjam-jam untuk membeli tiket, karena sudah pesan melalui aplikasi dari jauh hari sehingga kepergiannya menjadi lebih terencana," jelasnya.

— ts/mh



FOTO: OJ/ NR

Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan.



Oleh:  
**Ki Darmaningtyas**  
Ketua Institut Studi Transportasi  
(INSTRAN)

Ini artinya masyarakat betul-betul merasakan puas terhadap penyelenggaraan angkutan mudik lebaran. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau populer disebut Jokowi mampu mewujudkan Penyelenggaraan Angkutan Mudik Lebaran 1444 H atau 2023 yang efektif untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia merdeka.

Keberhasilan tersebut sangat mungkin justru karena dipicu oleh munculnya angka perkiraan pemudik yang akan mencapai 123,8 juta pemudik. Karena prediksi angka pemudik cukup tinggi, makaantisipasi pemerintah terhadap arus mudik sangat ekstra. Semua kekuatan yang ada dikerahkan. Bahkan, Presiden Jokowi sendiri dua minggu sebelum lebaran meninjau langsung Pelabuhan Merak untuk melihat persiapan di sana, mengingat pada mudik 2022 lalu di Pelabuhan Merak terjadi kekacauan yang berdampak pada kemacetan yang begitu panjang. Presiden Jokowi memastikan bahwa pada arus mudik 2023 kekacauan tersebut tidak boleh terjadi lagi.

# Mudik 2023: Mudik Lancar dan Berkeselamatan

Penyelenggaraan Angkutan Mudik Lebaran 2023 dinilai berhasil dilihat dari tingkat kelancaran lalu lintas dan menurunnya jumlah korban meninggal dunia selama mudik Lebaran. Sesuai dengan hasil survei Indikator, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan angkutan mudik lebaran mencapai 85% lebih.

## Melihat Lapangan

Di Pelabuhan Merak misalnya, jika pada arus mudik 2022 menyisakan persoalan antrian panjang sebagai konsekuensi adanya perubahan sistem penjualan tiket (ticketing) penyeberangan secara online yang belum tersosialisasikan secara massif, serta bercampur-aduknya kendaraan besar dan kecil di Pelabuhan Merak maupun Bakauheni, maka keduanya tidak ditemukan pada arus mudik 2023.

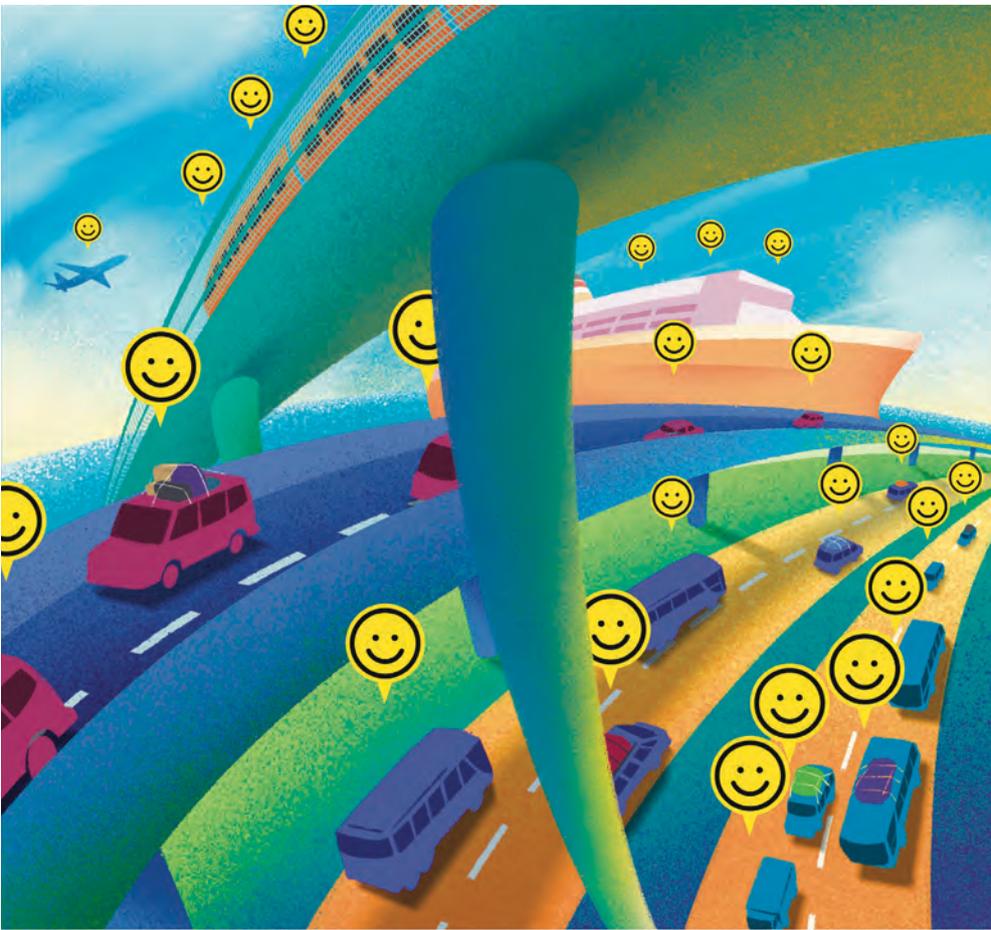
Pertama, persoalan *ticketing*. Masyarakat dengan mudah bisa memperoleh tiket penyeberangan yang dijual di gerai-gerai di sekitar kawasan pelabuhan, baik di Merak yang merupakan tempat penyeberangan kendaraan penumpang maupun Ciwandan yang merupakan tempat penyeberangan

kendaraan roda dua dan truk.

Kedua, soal bercampur-aduknya antara kendaraan besar dan kecil. Belajar dari pengalaman mudik 2022 yang terjadi kemacetan di Pelabuhan Merak, maka pada arus mudik 2023 ini pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan melakukan rekayasa lalu lintas dengan cara memisahkan pemberangkatan antara kendaraan besar (mobil) dan penumpang angkutan umum dengan sepeda motor dan truk. Kendaraan penumpang dan angkutan umum menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni, sementara sepeda motor melalui Pelabuhan Ciwandan ke Panjang. Pemisahan ini cukup efektif mengurai kemacetan dan kekroitan di Pelabuhan Merak.

Pengalihan pemudik sepeda

**Kemacetan selama berjam-jam yang dulu selalu menjadi momok pada setiap kali mudik lebaran (termasuk arus baliknya) kini tinggal kenangan saja.**



motor dari Merak ke Ciwandan ternyata juga menguntungkan bagi mereka yang mudik ke arah Bandar Lampung dan seterusnya, karena kalau dari Ciwandan turun di Pelabuhan Panjang, maka itu lebih mempersingkat perjalanan mereka di Lampung. Jarak Panjang-Bandar Lampung lebih dekat dibandingkan dengan jarak Bakauheni-Bandar Lampung. Jarak dari Serang ke Pelabuhan Ciwandan juga jauh lebih dekat daripada Serang ke Merak. Jadi pemberangkatan pemudik sepeda motor yang dipindahkan dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Ciwandan sebetulnya menguntungkan para pemudik, karena lebih mempersingkat perjalanan mereka, sehingga tidak menimbulkan resistensi.

### Mudik Lewat Tol Trans Jawa

Kemacetan selama berjam-jam yang dulu selalu menjadi momok pada setiap kali mudik lebaran (termasuk arus baliknya) kini tinggal kenangan saja. Selama proses Penyelenggaraan Angkutan Mudik Lebaran 1444 H atau 2023 tidak terdengar lagi suara-suara masyarakat yang terjebak di jalanan selama berjam-jam. Dahulu perjalanan Jakarta-Cirebon ditempuh dalam waktu 12 jam pada saat mudik lebaran itu hal yang biasa. Tapi tahun 2023 maksimal dapat ditempuh dalam enam jam saja.

Konsentrasi penuh perhatian pemerintah di jalan tol, terutama memfasilitasi pemudik sehingga arus

Indikator lain untuk melihat kesuksesan Penyelenggaraan Angkutan Mudik Lebaran adalah menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas (laka lintas), terutama yang meninggal dunia.

kendaraan bukan pemudik dialihkan melalui jalan alteri. Kebijakan one way yang cukup panjang (dari Cikampek sampai Kalikangkung) memang memanjakan pemudik agar perjalanan mereka lancar dan memberi kesan positif. Namun, yang sering dirugikan adalah mereka yang akan melakukan perjalanan arah sebaliknya. .

### Menurunnya Tingkat Laka Lintas

Indikator lain untuk melihat kesuksesan Penyelenggaraan Angkutan Mudik Lebaran adalah menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas (laka lintas), terutama yang meninggal dunia.

Laporan sementara berdasarkan data pemberian Santuan Jasa Raharja selama Operasi Ketupat H -5 sd H+4 (18 -27 April 2023), jumlah kecelakaan berdasarkan Laporan Polisi pada tahun 2023 mencapai 2.676 kejadian atau turun 25,60% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 3.597 kejadian.

Menurunnya, jumlah korban meninggal dunia maupun peristiwa laka lintas ini merupakan hal positif yang perlu diapresiasi. Karena salah satu hakekat Penyelenggaraan Angkutan Mudik Lebaran adalah mewujudkan layanan transportasi yang berkeselamatan. 🍃

# Mengatasi KKB Dengan Desain Komprehensif

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua kembali berulah dengan menembaki prajurit TNI dari Satgas Yonif R 321/GT yang bertugas di wilayah Mugi-Mam, Kabupaten Nduga, April lalu. Satu prajurit TNI gugur, yaitu Pratu Miftakhul Arifin, empat prajurit terluka, dan empat prajurit lainnya dalam pencarian.

**A**kibat insiden ini, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan, menaikkan status menjadi Siaga Tempur di wilayah Rawan di Papua. Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah untuk tidak setengah hati menyelesaikan rangkaian kekerasan yang dilakukan KKB. Termasuk saat Panglima TNI menaikkan status menjadi siaga tempur. Menurutnya ini tidak boleh setengah-setengah.

Sukamta menilai, rangkaian serangan oleh KKB di Papua yang menyebabkan cukup banyak prajurit TNI dan warga sipil menjadi korban, menunjukkan pemerintah selama ini tidak memiliki desain penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh.

"Adanya rangkaian serangan oleh KKB yang menyebabkan cukup banyak prajurit TNI dan warga sipil menjadi korban, menunjukkan pemerintah selama ini tidak memiliki desain penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh. Kalau mau ditingkatkan jadi siaga tempur, tapi pendekatannya masih setengah hati, yang akan jadi korban para prajurit TNI dan warga sipil," terang Sukamta.

Menurutnya, mestinya pemerintah dengan informasi yang dihimpun oleh intelijen dan masukan dari tokoh masyarakat lokal bisa menentukan

“

**Adanya rangkaian serangan oleh KKB yang menyebabkan cukup banyak prajurit TNI dan warga sipil menjadi korban, menunjukkan pemerintah selama ini tidak memiliki desain penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh.**

**Sukamta**  
Anggota Komisi I DPR RI



FOTO: RUNI/NR

pendekatan apa yang paling tuntas untuk memutus rangkaian kekerasan yang dilakukan KKB.

"Siapa aktornya, bagaimana jaringannya, di mana wilayah kerjanya, saya yakin pemerintah sudah mengetahui. Kalau ini masuk dalam kategori separatisme, mestinya jelas siapa yang punya tanggung jawab mengatasi hal ini. Ini kasihan prajurit TNI, Polri terus berguguran. TNI juga

dibelenggu dengan tidak adanya peraturan turunan dari UU tentang TNI terkait operasi militer selain perang," ungkap politisi PKS ini.

Di lain pihak, Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon juga menanggapi status Papua yang ditingkatkan menjadi siaga tempur oleh Panglima TNI. Menurutnya, Pemerintah Indonesia harus satu suara dulu terkait pemahaman penanganan situasi



FOTO: DOK/INR

“

Menurut saya, pemerintah ini harus satu suara. Kita harus jelas dulu nomenklaturnya dalam menghadapi ini. Ini KKB atau KST (Kelompok Separatis Teroris). Itu penanganannya beda. Terbaru ini, termasuk melakukan tindakan-tindakan teror yang nyata. Jadi, pemerintah, menurut saya, harus tegas.

Fadli Zon  
Ketua BKSAP DPR RI

yang kian kalut ini. Sehingga, tidak menambah korban yang berjatuhan, baik tentara maupun masyarakat sipil.

"Menurut saya, pemerintah ini harus satu suara. Kita harus jelas dulu nomenklaturnya dalam menghadapi ini. Ini KKB atau KST (Kelompok Separatis Teroris). Itu penanganannya beda. Terbaru ini,

termasuk melakukan tindakan-tindakan teror yang nyata. Jadi, pemerintah, menurut saya, harus tegas. Banyak sekali warga sipil yang sudah meninggal dan demikian juga tentara," ungkap Fadli.

Menyoroti penanganan masyarakat sipil di Papua, politisi Fraksi Partai Gerindra itu berharap

TNI lebih waspada dan berhati-hati. Jika memang masyarakat sipil tersebut terbukti turut mendukung penyerangan dan bersenjata, jelasnya, maka tidak bisa dianggap sebagai masyarakat sipil. Oleh sebab itu, dia mengingatkan kembali Pemerintah Indonesia membuat perencanaan hingga penelusuran secara matang dan tuntas.

"Saya tidak ingin lebih banyak ada korban jiwa. (Maka) harus tegas dengan perencanaan dan tuntas di dalam menelusuri persoalannya yang terkait (penyerangan dengan) senjata," ujar Fadli. Sebelumnya, pihak TNI telah mengupayakan pendekatan lunak di Papua dengan membangun komunikasi dengan warga maupun operasi teritorial. Selain itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah membentuk satuan tugas untuk operasi penyelamatan tersebut. Kehadiran satgas diharapkan dapat menjadi jembatan dialog dengan sejumlah tokoh adat. — ssb/mh

“

Siapa aktornya, bagaimana jaringannya, di mana wilayah kerjanya, saya yakin pemerintah sudah mengetahui. Kalau ini masuk dalam kategori separatisme, mestinya jelas siapa yang punya tanggung jawab mengatasi hal ini. Ini kasihan prajurit TNI, Polri terus berguguran. TNI juga dibelenggu dengan tidak adanya peraturan turunan dari UU tentang TNI terkait operasi militer selain perang,

Sukamta  
Anggota Komisi I DPR RI

# Cetak Sejarah, BUMN Sumbang Dividen Rp80,2 Triliun

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan, akan memberikan dividen kepada negara Rp 80,2 triliun pada tahun 2023. Angka ini dua kali lipat lebih besar daripada tahun sebelumnya dan merupakan jumlah dividen terbesar sepanjang sejarah.

Ini membuktikan kinerja jajaran Kementerian BUMN yang fokus bekerja dan memiliki strategi bisnis yang tepat. Melihat besarnya dividen ini, DPR RI pun mengapresiasi Kementerian BUMN dan kemampuan manajerial Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Pada masa pandemi Covid-19 Indonesia sempat mengalami fluktuasi, namun perlahan pertumbuhan ekonomi nasional terus membaik. Dividen sebesar Rp80,2 triliun ini menunjukkan BUMN telah tumbuh positif.

Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi mengatakan, dividen BUMN Rp80,2 triliun akan berkontribusi terhadap APBN. BUMN dinilai berperan sebagai fungsi fiskal, sehingga diharapkan secara efektif mendukung program-program pemerintah, dalam mendorong pertumbuhan makro ekonomi.

"Ini adalah capaian yang baik bahwa BUMN memberikan sumbangsih untuk negara hingga Rp80 triliun. Kami berharap kinerja BUMN yang sudah baik terus dijaga dan dilanjutkan, sehingga semakin banyak program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," tutur politisi Fraksi PAN itu, awal Mei lalu.

Kementerian BUMN memperkirakan laba bersih konsolidasi BUMN mencapai Rp303,7 triliun pada 2022. Dengan demikian, terdapat kemungkinan peningkatan



FOTO: OJI/NR

“

Ini adalah capaian yang baik bahwa BUMN memberikan sumbangsih untuk negara hingga Rp80 triliun. Kami berharap kinerja BUMN yang sudah baik terus dijaga dan dilanjutkan

**Intan Fauzi**  
Anggota Komisi VI DPR RI

laba yang sangat signifikan sebesar Rp179 triliun. Peningkatan aset diperkirakan menjadi Rp9,867 triliun (unaudited) pada 2022 dibandingkan 2021 sebesar Rp8,978 triliun. Sementara ekuitas juga naik menjadi Rp3,150 triliun (unaudited) dibandingkan 2021 sebesar Rp2,778 triliun. Adapun pendapatan BUMN 2022 diperkirakan mencapai Rp2,613 triliun (unaudited), naik dibandingkan tahun sebelumnya Rp2,292 triliun.

Kemudian Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan sumbangsih dividen sebesar Rp80,2 triliun ini diberikan agar negara tak hanya mendapatkan pemasukan dari

pajak, namun juga hasil usaha yang baik. Dividen ini juga diharapkan dapat mendorong program-program seperti bantuan sosial dan sebagainya. Sehingga, BUMN sehat dan bisa berkontribusi kepada rakyat Indonesia.

Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan juga menyatakan bahwa Kementerian BUMN telah berperan penting dalam kontribusi kepada negara melalui dividen, pajak, dan penerimaan negara bukan pajak. "Hal yang sangat membanggakan yakni transformasi BUMN yang sudah didorong hampir mencapai 70 persen hingga 75 persen ini, dan hanya tinggal 25 persen untuk mencapai

100 persen," ujarnya, awal Mei lalu.

Melihat sikap tersebut, politisi Fraksi PKB itu mengaku bangga sebagai mitra dan akan terus mendukung serta memberikan masukan secara maksimal kepada Kementerian BUMN agar menjadi development government. "Dengan demikian, negara tidak hanya mendapatkan pemasukan dari hasil pajak, tapi juga hasil usaha yang baik," ucapnya.

Terlepas dari catatan performa bisnis yang terus meningkat, Nasim juga meminta agar Erick Thohir mendorong perbaikan kinerja, terutama pada perusahaan BUMN yang masih belum sehat. "Komisi VI DPR RI sebagai mitra utama Kementerian BUMN terus mendorong kinerja BUMN menjadi yang Ber-AKHLAK, Kementerian BUMN menjadi development government, dan lain sebagainya," pungkas Nasim.

Senada dengan Nasim, Anggota Komisi VI lainnya Achmad Baidowi juga turut menyampaikan apresiasinya atas strategi dan profesionalitas Kementerian BUMN. Lantaran hal tersebut mampu

“  
Hal yang sangat membanggakan yakni transformasi BUMN yang sudah didorong hampir mencapai 70 persen hingga 75 persen ini, dan hanya tinggal 25 persen untuk mencapai 100 persen

Nasim Khan  
Anggota Komisi VI DPR RI



FOTO: OJI/NR

membuat BUMN menjadi sebuah entitas bisnis yang menjalankan fungsi bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu strategi yang diapresiasinya yakni pembuatan holding yang mampu membuat kinerja BUMN menjadi lebih efisien dan terarah.

"Kementerian BUMN memang sedikit berbeda dengan kementerian lainnya. Institusi ini diperintahkan untuk mencari keuntungan dan mendukung pembangunan serta memberikan manfaat sosial dan lingkungan kepada masyarakat," ungkap Baidowi pada Selasa, awal Mei lalu.

Ke depan, dia meminta Kementerian BUMN agar tidak berpuas diri, tetapi terus melakukan pembenahan. Pembenahan yang dapat dilakukan di antaranya, memastikan operasional perusahaan-perusahaan BUMN bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Berikutnya, Kementerian BUMN juga harus memastikan bahwa jajaran direksi dan komisaris diisi oleh orang-orang yang berkompeten, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan.

"Kami meminta agar kasus seperti ditetapkannya dirut Waskita sebagai tersangka tidak lagi terjadi di BUMN lain. Erick harus menjadikan hal ini sebagai pelajaran untuk bersih-bersih BUMN agar bisa lebih profesional dan memberikan keuntungan lebih besar kepada negara," ujar Baidowi.

gal/mh

“  
Kementerian BUMN memang sedikit berbeda dengan kementerian lainnya. Institusi ini diperintahkan untuk mencari keuntungan dan mendukung pembangunan serta memberikan manfaat sosial dan lingkungan kepada masyarakat

Achmad Baidowi  
Anggota Komisi VI DPR RI



FOTO: OJI/NR

# RUU Perampasan Aset: Menekan Kejahatan TPPU

Sejak terungkapnya kasus transaksi janggal senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang diungkap oleh Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD, publik terus mendorong DPR dan pemerintah meneruskan pembahasan RUU Perampasan Aset.

**D**i tengah desakan publik yang semakin kuat sejak bergulirnya TPPU tersebut, DPR melalui Komisi III pun meminta pemerintah segera mengirimkan draf naskah akademik dan RUU Perampasan Aset kepada DPR agar segera dibahas bersama. Sebab, RUU tersebut adalah usulan pemerintah.

Anggota Komisi III Arsul Sani, akhir Maret lalu, mengatakan bahwa pembahasan RUU yang bertujuan menekan tingkat kejahatan TPPU dan memenuhi kebutuhan hukum tersebut akan berjalan, jika pemerintah segera mengirimkan draf NA dan draf RUU. "Sekarang ini, kan, yang dikesankan adalah DPR tidak

“

Sekarang ini, kan, yang dikesankan adalah DPR tidak mau membahasnya. Padahal, naskah akademik dan draf RUU-nya saja belum dikirim ke DPR

Asrul Sani  
Anggota Komisi III DPR RI

FOTO: JAKA/NR



mau membahasnya. Padahal, naskah akademik dan draf RUU-nya saja belum dikirim ke DPR," ungkapnya.

RUU Perampasan Aset diketahui telah melalui proses yang panjang. RUU tersebut mulai diusulkan PPAK pada tahun 2008 dan terakhir pada tahun 2022, RUU tersebut disetujui masuk prolegnas prioritas tahun 2023. Arsul menyatakan, pihaknya tak pernah menolak membahas RUU Perampasan Aset. Adapun lamanya waktu yang dibutuhkan akan bergantung pada masukkan banyak pihak.

"Yang mana, RUU dari pemerintah yang tidak kami bahas? Bahwa dalam pembahasannya itu lama seperti RCUHAP misalnya, bahkan sampai melewati satu periode DPR, itu konsekuensi dari kita ingin mendengarkan masukan dari banyak pihak," ujar politisi Fraksi

PPP ini. Dengan demikian, Arsul menegaskan, untuk mendapatkan kepastian hukum terkait pembahasan RUU Perampasan Aset ini harus berhati-hati dan tidak dapat dikebut.

Gayung bersambut, pemerintah pada 4 Mei 2023 akhirnya mengirimkan Surat Presiden (Surpres) No.R 22-pres-05-2023 tentang RUU Perampasan Aset. Surpres tersebut juga dibarengi dengan surat tugas pembahasan RUU Perampasan Aset yang berkaitan dengan pihak mana saja yang akan dilibatkan dalam membahas RUU tersebut bersama DPR.

Dalam Surat Tugas bernomor B399-M-D-HK-0000-05-2023 disebutkan, ada dua menteri dan dua pimpinan lembaga pemerintah yang akan turut dilibatkan dalam pembahasan RUU ini. Diantaranya Menko Polhukam Mahfud MD,

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

### **Kepentingan Bangsa**

Setelah pemerintah mengirimkan draf RUU Perampasan Aset kepada DPR, Anggota Komisi III Supriansa mengatakan, DPR berkomitmen penuh untuk membahas RUU tersebut dengan penuh kehati-hatian. "Saya tegaskan bahwa ketika ada yang meragukan komitmen DPR untuk tidak membahas RUU Perampasan Aset, maka jangan ragukan komitmen. DPR berpikir untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara, demi kemakmuran Rakyat Indonesia," tandasnya.

Terhadap pembahasan RUU tersebut, Komisi III juga berkomitmen membahasnya dengan sedetail mungkin. Sehingga isinya tidak bertabrakan dengan undang-undang yang sudah ada. "Kita membuatnya penuh dalam kehati-hatian, supaya tidak bertabrakan dengan UU eksisting sekarang ini, kita tidak bisa melahirkan UU yang bertabrakan dengan UU yang lain, jelasnya.

Oleh sebab itu, Supriansa

“

**Saya tegaskan bahwa ketika ada yang meragukan komitmen DPR untuk tidak membahas RUU Perampasan Aset, maka jangan ragukan komitmen. DPR berpikir untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara, demi kemakmuran Rakyat Indonesia**

**Supriansa**  
Anggota Komisi III DPR RI

FOTO: JAKA/NR



meminta kepada semua pihak dan masyarakat untuk memberikan dukungan dan doa agar pembahasan RUU ini bisa diselesaikan dengan baik. "Saya minta kepada semua pihak dan masyarakat untuk mendoakan bahwa apa yang menjadi usulan pemerintah, RUU Perampasan Aset, bisa kita selesaikan dalam tempo

sesingkat-singkatnya, mudah-mudahan tidak ada kendala," harap legislator dapil Sulawesi Selatan II ini.

Senada dengan Supriansa, Anggota Komisi III Wihadi mengatakan, RUU Perampasan Aset membutuhkan masukan dari para ahli dan masyarakat. "Karena kita melihat bahwa ini undang-undang yang memang memerlukan banyak masukan dari para ahli dan berbagai pihak, karena ini menyangkut hal yang baru," jelas politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Untuk itu, pihaknya akan mendengarkan masukan dari para ahli serta berbagai pihak lainnya untuk mempelajari dan membahas draf RUU tersebut beserta naskah akademiknya. Pembahasan RUU ini akan menempuh mekanisme mulai dari rapat pimpinan (Rapim) yang diikuti Ketua DPR beserta wakilnya, kemudian dilanjutkan rapat pengganti musyawarah di Bamus. Ada juga pembuatan Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang cukup memakan waktu.

— **bia/mh**

“

**Karena kita melihat bahwa ini undang-undang yang memang memerlukan banyak masukan dari para ahli dan berbagai pihak, karena ini menyangkut hal yang baru**

**Wihadi**  
Anggota Komisi III DPR RI

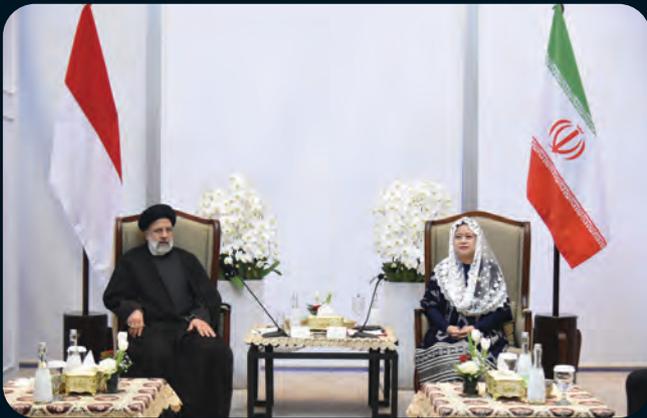
FOTO: JAKA/NR





Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani beserta jajaran pimpinan DPR RI lainnya, menerima kunjungan dari Presiden Republik Islam Iran H.E. Sayyed Ebrahim Raisi, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

FOTO : DEVI, MUNCHEN, FAJAR, JAKA DAN KRESNO/MAN



Anggota DPR RI Sukamta secara resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI. Acara pelantikan langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk F. Paulus yang digelar di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

FOTO: GERALDI/MAN





Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid secara resmi menerima kunjungan kehormatan dari Parlemen Korea Selatan di Ruang Delegasi Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, (15/5/2023).  
FOTO: RUNI/MAN



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae di dampingi anggota DPR RI menerima kunjungan delegasi Parlemen Uni Eropa, yang digelar di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5/2023).  
FOTO: ARIEF/MAN



# FOTO BERITA



Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Kesehatan Emanuel Melkiades Laka Lena foto bersama usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Mahasiswa UI Fakultas Kesehatan dan Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI) di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Selasa (23/5/2023). FOTO: MU/MAN



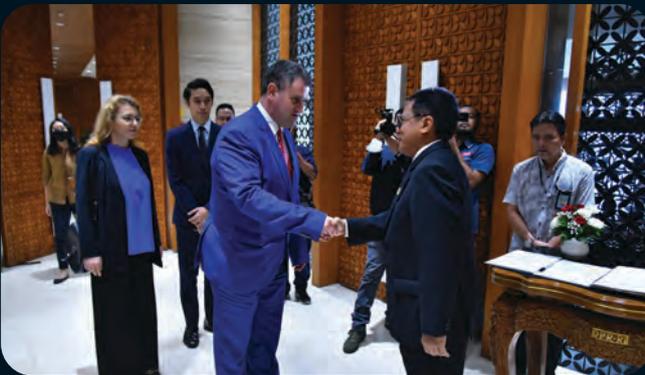
Wakil Ketua Komisi X Agustina Wilujeng Pramestuti dalam foto bersama usai menerima kunjungan delegasi Komite Transportasi dan Pariwisata Parlemen Uni Eropa di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Selasa (16/5/2023). FOTO: JAKA/MAN



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan kehormatan Wakil Menteri Luar Negeri Polandia Wojciech Gerwel di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2023). Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua BKSAP DPR RI Gilang Dhielafararez, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana dan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Achmad Hafisz Tohir. Selasa (23/5/2023). FOTO: TARI/MAN



Ketua Panja RUU Kesehatan Emanuel Melkiades Laka Lena dalam foto bersama usai kegiatan Public Hearing terkait pembahasan RUU Kesehatan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (10/5/2023). FOTO: OJI/MAN



Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar saat menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) Duta Rumania untuk Indonesia H.E Dan Adrian Balanescu di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (26/5/2023). FOTO : KRESNO/MAN



Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar membuka Rapat Akhir Tahun (RAT) Setjen DPR RI, di Gedung Nusantara, Senayan Jakarta, Senin (15/5/2023). Dalam sambutannya Indra berharap agar Koperasi Pegawai Setjen DPR RI lebih mengembangkan gagasan kreatif dengan terobosan-terobosan baru dalam pengembangan usahanya.. FOTO: DEVI/MAN

Dalam rangka memperingati International Audit Awareness Month 2023 yang diselenggarakan di tiap tahunnya pada bulan Mei, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal (Ittama Setjen) DPR RI menyelenggarakan Seminar Nasional (Semnas) bertema 'Role Of Internal Audit In Nation Building' di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/5/2023). FOTO : FARHAN/MAN





# Buruh di May Day 2023

NASKAH: ANDRI FOTO: DEVI

**H**ari Buruh Sedunia atau May Day diperingati setiap 1 Mei. Di Indonesia, Hari Buruh ditetapkan sebagai salah satu libur nasional. Dalam peringatan Hari Buruh ini, sekitar 50 ribu buruh ikut aksi May Day di Istana dan MK, dilanjutkan May Day Fiesta di Istora Senayan.

Sebanyak 50 ribu buruh menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin 1 Mei 2023 lalu. Aksi May Day juga dilakukan di beberapa provinsi. Ada 38 provinsi terkonfirmasi melakukan aksi May Day serempak serta ratusan kabupaten/kota turut mengikuti aksi May Day.

Selepas aksi di Istana dan gedung MK, massa bergerak menuju Istora Senayan. *May Day Fiesta* diisi pidato dan orasi dari pimpinan buruh.

Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap 1 Mei

ini biasanya menjadi ajang organisasi serikat buruh untuk mengusung berbagai isu publik. Ada 7 tuntutan yang diusung dalam May Day tahun 2023 ini.

Pertama, cabut Omnibus Law UU No.6/2023 tentang Cipta Kerja. Kedua, cabut parliamentary threshold 4 persen dan presidential threshold 20 persen, karena membahayakan demokrasi yang kita kenal. Ketiga, sahkan RUU DPR dan perlindungan pekerja rumah tangga. Keempat, tolak RUU Kesehatan.

Kelima, reforma agraria dan kedaulatan pangan. Tolak bank tanah, tolak impor beras, kedelai, dan lain-lain. Keenam, pilih capres yang pro buruh dan kelas pekerja. Partai buruh haram hukumnya berkoalisi dengan parpol yang mengesahkan UU Cipta Kerja. Ketujuh, HOSTUM, hapus outsourcing tolak upah murah. . .





Sejumlah buruh memegang spanduk dan poster juga menyalakan bom asap Smoke Bomb saat aksi Hari Buruh Internasional di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (1/5/2023). Aksi May Day 2023 tersebut diwarnai dengan menyalakan smoke bomb sebagai simbol berjalannya demo dengan damai. FOTO: DEVI



**Rifqinizamy Karsayuda**

# **Anak Guru SD yang Melenggang ke Senayan**

Siapa sangka anak seorang guru sekolah dasar di pelosok Kalimantan Selatan kini melenggang menjadi seorang politisi muda sukses Senayan. Ini adalah cerita tentang Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, seorang pemuda yang lahir dari pasangan Haji Muhammad Karsayuda (alm) dan Hajjah Rusdiniyah di Hulu Sungai Tengah, sebuah desa yang berjarak 170 km sebelah utara Banjarmasin, ibu kota Kalimantan Selatan, 6 November 1982 lalu.

**R**ifqi kecil menempuh pendidikan dasar di kampung halamannya, Hulu Sungai Tengah dan Pontianak, Kalimantan Barat. Sementara pendidikan menengah pertama dilaluinya sebagai santri pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Modern Islam (PPMI) Assalaam, Surakarta, Jawa Tengah. Sementara pendidikan menengah atas pada SMU Negeri 1 Pontianak.

Lulus SMU, ia melanjutkan pendidikan strata satunya pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan selesai tahun 2005 dengan predikat summa cum laude. Kecerdasan dan kerja kerasnya membawa Rifqi melanjutkan pendidikan strata dua di National University of Malaysia, Kuala Lumpur dengan spesialisasi di bidang constitutional laws melalui jalur beasiswa luar negeri dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Departemen Pendidikan Nasional pada 2007.

Setelahnya, Rifqi aktif sebagai

“

**Saya aktif berorganisasi, itu yang membuat saya bersentuhan dengan multi-stakeholders di kampus yang pada waktunya memang merekalah yang bergotong-royong mendorong saya terjun ke politik**

Dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Di sela 11 tahun mengajar, Rifqi juga menyempatkan diri melanjutkan ke jenjang strata tiganya. Kali ini mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang juga melalui jalur beasiswa pada tahun 2011.

Selama mengikuti pendidikan hingga mengajar, Rifqi mengaku sangat aktif berorganisasi. Dari sinilah menurutnya menjadi titik awal ia masuk panggung politik. Sebelum terjun ke dunia politik, karakter kepemimpinan Rifqi diasah sebagai

aktivis. Ia sudah aktif di berbagai organisasi sejak menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Rifqi dikenal sebagai aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta kala itu.

"Saya aktif berorganisasi, itu yang membuat saya bersentuhan dengan multi-stakeholders di kampus yang pada waktunya memang merekalah yang bergotong-royong mendorong saya terjun ke politik," jelas salah satu Presidium Majelis Nasional KAHMI tahun 2022-2027 ini.

Puncaknya, pada 2018, Rifqi resmi mendaftarkan diri sebagai Bacaleg dari PDI Perjuangan dari Dapil Kalsel I meliputi Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong. Rifqi kemudian berhasil meraih suara terbanyak di partainya dan mengantarnya menjadi anggota DPR RI Periode 2019-2024.

"Kalau ditanya pernah atau tidak, saya merencanakan untuk terjun ke politik, saya jawab tidak pernah. Saya merasa tersesat saja di jalan yang benar di DPR saat ini. Tapi yang jelas selama 11 tahun menjadi dosen di kampung, saya mencoba berbuat di atas rata-rata. Saya tidak hanya mengajar dan menulis, tidak hanya menjadi peneliti sebagaimana tugas kampus, tapi saya juga aktif berorganisasi dan saya juga mempunyai kolom tetap di salah satu media terkemuka di Kalimantan Selatan. Saya juga mempunyai Talkshow rutin per minggu di salah



FOTO: FARHAN/AR

Anggota DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.



FOTO: FARHAN/ANR

Anggota DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

satu TV lokal di sana," jelas suami dari Gusti Anisa Wulandari ini.

Keputusannya berhenti dari dunia akademi dan melanjutkan ke dunia politik bukan tanpa tentangan. Rifqi menjelaskan, pertentangan itu hadir dari keluarga besarnya yang menganggap masuk ke dunia politik merupakan taruhan besar dalam karirnya. Namun, Rifqi menilai wajar hal itu terjadi. Rifqi mengaku, ada dua orang yang meyakinkan dirinya untuk terus maju sebagai calon anggota DPR saat itu, mereka adalah; ibu dan istri tercintanya.

"Secara umum saya selalu menanyakan keputusan-keputusan penting itu kepada dua orang, pertama Ibu saya. Ayah sudah tidak ada. Aaya yatim. Kedua, istri saya. keduanya mendukung saya. Oleh karena itu, saya merasa keluarga saya mendukung secara penuh keputusan-keputusan saya. Kalau keluarga besar wajarlah, kalau ada pertentangan. Bagi saya, di luar dua orang ini, saya tidak terlalu

memperhitungkan," jelasnya. Rifqi menganggap menjadi anggota legislatif di DPR merupakan puncak karir baginya dan akan berusaha memberikan yang terbaik sebagai anggota dewan.

"Saya menganggap DPR ini karir puncak saya, karena saya tidak tahu setelah ini masih diberi kesempatan atau tidak oleh Allah untuk berkarir

lagi. Kalau cita-cita kita sebagai manusia, kan, banyak, tapi bagi saya, ketika saya dikasih amanah ini, ini adalah amanah puncak sehingga saya harus memberikan yang terbaik, memberikan legacy semaksimal yang saya bisa. Dan anggaphlah bahwa mungkin kalau tuhan tidak memberikan kesempatan lain pada jabatan publik, maka tidak ada pilihan



**Kalau ditanya pernah atau tidak, saya merencanakan untuk terjun ke politik, saya jawab tidak pernah. Saya merasa tersesat saja di jalan yang benar di DPR saat ini. Tapi yang jelas selama 11 tahun menjadi dosen di kampung, saya mencoba berbuat di atas rata-rata. Saya tidak hanya mengajar dan menulis, tidak hanya menjadi peneliti sebagaimana tugas kampus, tapi saya juga aktif berorganisasi dan saya juga mempunyai kolom tetap di salah satu media terkemuka di Kalimantan Selatan**

bagi saya untuk menorehkan banyak karya dalam waktu lima tahun ini," jelasnya.

Dengan pola pikir seperti itu, membuatnya sadar memberikan semua hal terbaiknya selama bekerja. Hal itu juga yang coba ia buktikan selama ia berada di Komisi V dan kini di Komisi II DPR RI. "Dulu ketika saya di Komisi V, saya bekerja maksimal untuk membangun dan mengakselerasi infrastruktur di Kalimantan Selatan. Alhamdulillah itu secara nyata bisa dilihat progres infrastruktur di Kalimantan Selatan selama saya di Komisi V," ungkapnya.

Begitupun pada Februari 2021, ia diberi amanah bertugas di Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan, politik dalam negeri, pertanahan, tata ruang, kepegawaian dan kepemiluan. Rifqi sangat aktif menyuarakan isu-isu krusial demi kepentingan rakyat, beberapa diantaranya mengenai nasib honorer dan permasalahan mafia tanah.

Terkhusus mengenai nasib honorer, Rifqi mengaku mengerti betul mengenai nasib honorer, karena dirinya pun pernah merasakan menjadi honorer ketika awal memulai karir menjadi dosen. "Saya satu tahun pernah menjadi honorer. Sehingga, saya tahu betul nasib, baik soal kesejahteraan, maupun jaminan keberlangsungan status kerja seorang honorer," akunya.

Ia juga bercerita bagaimana sulitnya ia dulu membeli sebuah



Anggota DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

rumah KPR dengan luas tanah kurang dari 250 m2 yang harus dicicilnya selama 12 tahun di Kalimantan. Hal ini juga yang menurut Rifqi menjadi gambaran sederhana bagaimana sulitnya rakyat mendapatkan akses keadilan dalam memiliki sebidang tanah.

"*Access to justice* dalam konteks landreform di tempat kita ini menjadi persoalan. Bukan hanya kelompok menengah ke bawah, tetapi juga kelompok menengah, seorang PNS golongan III a, III b itu masih kesulitan. Oleh karena itu, saya konsen pada isu ini, selain juga pada isu lain, seperti kepemiluan yang menjadi agenda

rutin konstitusional kita selama lima tahun sekali," paparnya.

Dalam semua perjalanannya ini, Rifqi menyebutkan satu sosok penting yang selalu membuatnya optimis dalam menjalankan setiap jabatan yang ia emban. Ibu, sosok wanita kuat yang selalu mendoakannya dan memberikannya kekuatan dalam menjalankan semua tugas yang diamanahkan kepadanya.

"Ibu saya selalu bilang, 'mudah-mudahan kamu sehat berkah, seluruh cita-citamu dikabulkan dan mamah tidak pernah berhenti berdoa untuk kamu'. Dan hal itu juga yang mungkin membuat saya optimis di setiap jabatan politik ini. Saya itu tidak pernah terlalu khawatir dengan masa depan politik saya, saya tidak pernah takut setiap masa pemilu terpilih atau tidak. Saya berserah saja, karena hakikatnya amanah ini dari tuhan, dengan kekuasaannya dia bisa memberikan kekuasaan pada siapapun yang ia kehendaki dan bisa mencabut kekuasaan dari siapapun yang ia mau. Dan bagi saya, wakil tuhan di dunia itu mamah saya," tutupnya. — we/mh

“

***Access to justice* dalam konteks landreform di tempat kita ini menjadi persoalan. Bukan hanya kelompok menengah ke bawah, tetapi juga kelompok menengah, seorang PNS golongan III a, III b itu masih kesulitan. Oleh karena itu, saya konsen pada isu ini, selain juga pada isu lain, seperti kepemiluan yang menjadi agenda rutin konstitusional kita selama lima tahun sekali,**

# Mengawasi Stabilitas Keamanan Jelang Pemilu

Jelang Pemilu 2024, peran TNI tentu sangat dibutuhkan dalam menjaga stabilitas keamanan. Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari legislator partai PKS tersebut menekankan perlunya Korem 061/SK terus membuat strategi-strategi dalam menjaga kondusifitas wilayah terutama mengawal keamanan serta ketertiban jelang Pemilu 2024.

**“K**ami menekankan agar strategi-strategi dalam menjaga keamanan perlu terus dilakukan dan dievaluasi agar mitigasi permasalahan dapat dicegah maupun ditangani sedini mungkin. Untuk menciptakan kondisi yang kondusif apalagi menjelang Pemilu 2024,” ungkap Kharis usai ditemui *Parlementaria* dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR di Korem (Komando Resor Militer) 061/Surya Kencana, Bogor, Jumat (14/4/2023) silam.

Selain itu, Kharis mengapresiasi kinerja prajurit Korem 061/Surya Kencana atas inisiatifnya menghadapi berbagai tantangan dengan cara-cara persuasif serta komunikasi yang dijalin baik dengan masyarakat. “Saya kira Korem 061/SK sudah melakukan



FOTO: BUNGA/NR

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari saat bertukar cenderamata usai Kunres Komisi I ke di Korem 061/Surya Kencana.

tanggung jawabnya dengan baik, mereka berusaha melakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat menggunakan cara-cara dan komunikasi yang baik. Saya apresiasi dan acungi jempol terhadap upaya yang dilakukan,” nilainya.

Kharis juga menyampaikan dukungannya terhadap kinerja yang dilakukan Korem Surya Kencana, karena di tengah tantangan dan berbagai keterbatasan alutsista yang ada, Korem 061 tetap menjalankan tanggung jawabnya dalam mengatasi seluruh masalah yang ada, terlebih membantu masyarakat Cianjur yang sebelumnya terkena musibah gempa.

“Mereka bisa berusaha semaksimal mungkin mengatasi seluruh permasalahan yang ada, dengan kondisi, persediaan, perlengkapan yang secukupnya. Masih ada kekurangan di sana-sini, namun mereka tidak merasa lemah, dan tetap bersemangat. Apalagi, salah satu di wilayahnya kemarin terjadi bencana alam di Cianjur. Sampai saat ini mereka masih

terus beroperasi dalam membantu masyarakat untuk memulihkan kembali wilayah pasca bencana,” urai Kharis.

Sementara di Bandung, Jawa Barat, delegasi Komisi I DPR berkunjung ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan Daerah (KPID) dan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jawa Barat. Kujungan ini untuk mengawasi isi siaran Pemilu 2024.

“Kita tadi sudah mendapatkan masukan objektif yang terkait dengan kendala dan keluhannya. Ini menjadi bahan untuk kita bawa nanti ke rapat RDP di Komisi I,” tutur Nurul Arifin selaku Ketua Tim Kunker kepada *Parlementaria* se usai acara di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/4/2023) silam.

Terkait dengan persiapan menghadapi Pemilu 2024, KPI dan KPID menyatakan telah siap dan masih menunggu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) serta proses seleksi Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Adapun masukan KPI Pusat dan KPID



Ketua Tim Kunker Komisi I DPR RI Nurul Arifin saat memimpin pertemuan di Gedung Sate.

FOTO: GALUH/NR

untuk keterlibatan dalam menyusun PKPU terutama terkait pengawasan isi siaran pemilu serta melakukan tindakan terhadap pelanggaran isi siaran pemilu. KPI Pusat juga meminta pembentukan gugus tugas yang berisi Bawaslu, KPU Daerah, dan KPID.

"KPI harus berkoordinasi dengan KPU supaya tidak dipinggirkan, tapi menjadi satu bagian yang bersinergi, antara KPU, Bawaslu, KPI untuk melakukan pengawasan. Jadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran bisa mendapatkan sumber, tidak cuma Bawaslu saja dan kemudian KPI tidak hanya memberikan laporan ke Bawaslu, tapi juga bisa melakukan tindakan," terang politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Selain itu, KPID Jawa Barat juga

mengungkap kendala dan tantangan dalam melakukan pengawasan, salah satunya keterbatasan anggaran pengawasan. Selama ini KPID Jabar didukung oleh dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada 2021 KPID Jabar mendapat Rp5,3 miliar, kemudian 2022 dan 2023 ini mendapatkan Rp4,8 miliar. Untuk itu, KPID Jabar mengusulkan untuk dapat didanai oleh APBN, karena keterbatasan APBD Provinsi.

"Walaupun kalau melihat KPID-nya tadi dengan anggaran yang sangat terbatas tapi sudah bisa mengoptimalkan ide-idenyalah, kerjanya, dan gagasannya dengan menyertakan publik, begitu. Dan saya kira patut diapresiasi dan kita sih maunya KPID bisa independen kemudian anggaran juga langsung

dari APBN, begitu ya. Jadi, bisa lebih inovatif dalam menjalankan pekerjaan tupoksinya," harap legislator Dapil Jawa Barat I itu.

Di lokasi yang berbeda, Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah, menilai, penyelenggaraan analog switch off (ASO) oleh Kementerian Kominfo yang kurang bersinergi dengan Pemda di Provinsi Banten. Oleh karena itu, ia mendorong Diskominfo Tangerang Selatan untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemda, dan berbagai pihak lainnya, sehingga masyarakat mendapatkan informasi pemilu secara cepat, benar, dan obyektif.

"Kita harapkan ke depan penyelenggaraan di bidang penyiaran pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan baik. Kita harapkan analog switch off dan pembagian set top box ini bisa terdistribusikan dengan baik. Kerja sama antara Kementerian Kominfo dan juga lembaga penyiaran swasta yang berkomitmen memberikan set top box tersebut," ujarnya usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke Kantor Wali Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Jum'at (14/04/23) silam.

Selain itu, legislator Dapil Banten I itu juga mendorong KPI Pusat dan KPID Banten mempersiapkan langkah-langkah strategis. Hal itu untuk memastikan bahwa pemantauan isi siaran berjalan dengan mengusung prinsip netralitas dan tidak mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

"Komisi I tentu berharap (persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024) ini bisa berjalan secara objektif, bisa berjalan secara baik, menghindari bau-bau SARA, dan lain sebagainya yang bisa mencederai demokrasi kita. Kita juga berharap ke depan penyelenggaraan di bidang penyiaran Pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan baik," pungkasnya.

— b1f, gal, ais/mh



Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah.

FOTO: AISYAH/NR

# Memantau Kembali Persiapan Pemilu 2024

Komisi II DPR RI kembali memantau persiapan Pemilu 2024 di sejumlah daerah. Di Kota Cimahi, Jawa Barat, Komisi III menggelar pertemuan dengan KPUD setempat dan Bawaslu. Dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa, Komisi II ingin mengecek persiapan pelaksanaan tahapan pemilu.



Wakil Ketua Komisi II Saan Mustofa saat memimpin pertemuan Tim Kunres Komisi II DPR RI.

FOTO: BIANCA/NR

**P**ada pertemuan tersebut, Saan mengatakan, dengan luas wilayah hanya 40 kilometer persegi dengan kepadatan penduduk yang tinggi, sebanyak 600 ribu penduduk, pemilu di Kota Cimahi memiliki kemungkinan kendala-kendala yang dihadapi dalam menyongsong agenda lima tahunan itu. Seperti terbatasnya ruang yang bisa digunakan sebagai TPS maupun kesulitan memiliki tempat penyimpanan logistik pemilu.

"Di Kota Cimahi ini basis dapil bukan lagi kecamatan (melainkan) kelurahan. Karena basis dapilnya kelurahan, untuk membuat TPS itu tidak bisa seperti di lapangan. Di sini agak susah nyari gedung-gedung yang kosong. Terkait itu bisa dipahami tentang kesulitan menata ruang yang ada di Kota Cimahi," jelas legislator Dapil Jawa Barat VII itu, Jumat (14/4/2023) lalu.

Meski demikian, politisi Fraksi

Partai NasDem ini menilai, sejauh ini KPU maupun Bawaslu di Kota Cimahi sudah siap melaksanakan tahapan pemilu yang akan digelar serentak pada 14 Februari 2024 mendatang. "Kalau dilihat dari tahapan yang sudah dilakukan, mereka siap melaksanakan tahapan lanjutan dan pelaksanaan Pemilu 14 Februari 2024," ujar Saan.

Menjawab pertanyaan Komisi II terkait kendala yang dihadapi menjelang pemilu, Ketua KPU Kota Cimahi Mohamad Irman mengatakan, KPU Kota Cimahi masih dihadapkan dengan kesulitan mendapatkan gudang logistik pemilu. Pihaknya mengatakan butuh minimal 1.000 meter persegi ruangan yang bisa digunakan untuk menyimpan logistik pemilu. "Mudah-mudahan di tahun ini bisa disewakan gudang yang representatif yang bisa menampung seluruh logistik pemilu dan pilkada. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar, tetapi kita sudah komunikasi dengan Pemerintah Kota Cimahi," terangnya.

Sementara di Kota Bekasi, Jawa Barat, delegasi Komisi II yang dipimpin wakil ketuanya Yanuar Prihatin juga memantau tahapan Pemilihan Umum (pemilu) serentak 2024, Jumat (14/4/2023) lalu. "Kunjungan Kerja Reses Komisi II kali ini dalam rangka meninjau kesiapan Pemerintah Kota Bekasi bersama KPU Kota Bekasi dan Bawaslu di Kota Bekasi terkait pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. Juga ingin mengetahui apa saja bentuk dukungan dan fasilitas dari Pemkot Bekasi kepada penyelenggara Pemilu," ungkap Yanuar.

Politisi PKB ini menambahkan, Komisi II DPR juga ingin mendengar langsung apa saja langkah-langkah yang dilakukan Pemkot Bekasi dalam menyosialisasikan Pemilu Serentak 2024 kepada masyarakat dan juga pendidikan politik pada para pemilih agar angka partisipasi masyarakat dapat lebih optimal.

"Pada pemilu serentak tahun 2019

lalu persoalan logistik pemilu sempat mengemuka di berbagai daerah, sehingga kami perlu memastikan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024 bisa berjalan lebih baik, lancar, aman, dan kondusif," harap Yanuar. Legislator Dapil Jawa Barat X ini, meminta penjelasan bagaimana pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024, apa saja masalah yang ditemui, dan bagaimana tahapan berikutnya bisa berjalan lancar, aman dan kondusif.

"Berbagai kendala yang dihadapi dalam masa tahapan pemilu harus segera diantisipasi dan dicari jalan keluarnya agar tidak menghambat tahapan pemilu yang sedang berjalan," imbuh Yanuar. KPU memiliki beberapa sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tahapan dan terpusat di KPU RI, seperti SIPOL, SILON, SIDALIH, SIAKBA, dan lain-lain. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi II DPR, imbuh Yanuar, juga mempertanyakan apakah KPU Kota Bekasi mengalami permasalahan terkait penggunaan sistem informasi tersebut.

Menjawab pertanyaan tersebut, Ketua KPU Kota Bekasi Nurul Sumarheni mengungkapkan beberapa permasalahan pada penggunaan SIDALIH adalah server yang sering melambat dan



FOTO: OJI/NR

Wakil Ketua Komisi II DPR RI H. Yanuar Prihatin saat memimpin pertemuan Tim Kunres Komisi II DPR RI.

sulit diakses pada waktu-waktu proses unggah atau unduh data. "Aplikasi SILON dan SIPOL sebagai alat bantu yang digunakan oleh KPU Kota Bekasi dalam tahapan verifikasi administrasi dan faktual pada awal penggunaannya pada tahapan awal verifikasi administrasi mengalami perlambatan koneksi dan akses sehingga proses verifikasi administrasi belum dapat dilakukan secara optimal pada masa awal tahapan verifikasi administrasi," katanya.

Sedangkan aplikasi SIAKBA masih lambat diakses, sehingga mengganggu pendaftar dan

mengganggu kecepatan verifikator melakukan verifikasi berkas pendaftaran pendaftar. Kendala teknis lainnya, seperti salah mendaftar kecamatan, lalu ingin mengganti tujuan pendaftaran sesuai KTP/daftar yang ke-2, tetapi gagal karena muncul keterangan NIK sudah digunakan (merubah tujuan pendaftaran KTP dan NIK harus melakukan reset data)," pungkasnya.

Di tempat berbeda, Anggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro Yahman menyoroti soal permasalahan tagihan Pajak Bumi dan Pembangunan (PBB) dan cara pembayarannya yang tidak efisien di Kota Tangerang, Banten. Sebab, ia mendapati banyak keluhan dari masyarakat yang mengalami masalah pembayaran PBB ini. Karena itu, menurutnya, perlu menjadi penekanan dan menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Banten.

"Pembayaran PBB tahun yang sudah lewat ternyata muncul lagi, seolah-olah belum bayar. Ini masih menjadi masalah di masyarakat," tutur Endro kepada *Parlementaria* usai mengikuti rapat Kunjungan Kerja (Kunker) masa reses Komisi II DPR RI ke Kota Tangerang, Provinsi Banten, Jumat (14/04/2023) lalu. — **bia, oji, aas/mh**



FOTO: ANJU/NR

Anggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro Yahman saat mengikuti rapat Kunres Komisi II DPR RI.

# Menyorot Penegak Hukum Nakal dan Korupsi

Para penegak hukum yang kerap kali memeras para pihak yang sedang berperkara, sebaiknya ditindak tegas dengan mempidakannya.

Selama ini, para penegak hukum nakal tersebut hanya mendapat sanksi mutasi, penurunan pangkat, atau sanksi etik. Dengan mempidanakannya, itu lebih jelas dan membawa efek jera.



FOTO: HUSEN/NR

Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi.

Ini adalah yang disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi saat mengikuti kunjungan kerja ke kantor Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya. Ia mengatakan, para penegak hukum yang nakal tersebut telah merusak integritas dan kredibilitas dirinya. Di hadapan para hakim, sekali lagi Johan menegaskan, para penegak hukum perlu dipidanakan bila melakukan hal-hal tercela yang merusak integritas dan kredibilitas.

Memperdagangkan perkara atau memeras orang yang sedang berperkara merupakan tindakan tercela yang tidak cukup hanya dimutasi atau diberi sanksi etik. Hal ini disampaikan Johan Kamis (11/5/2023) silam. Penegak hukum yang dimaksud, tidak saja di kepolisian atau

kejaksaan, tapi juga di pengadilan.

"Masih ada hakim-hakim yang nakal, yang coba memeras. Tentu harus dilaporkan ke Ketua PT atau Ketua MA. Mereka memperdagangkan kasus. Anggaran (untuk insentif) memang perlu ditingkatkan, tapi kredibilitas dan integritas juga perlu ditingkatkan," pandang Johan.

Politisi PDI Perjuangan itu, menambahkan, insentif bagi para penegak hukum memang perlu diberikan secara ideal. Insentif diberikan per perkara yang ditangani. Dengan insentif itu, diharapkan perbuatan tercela bisa dikurangi. Di pengadilan, misalnya, kasus-kasus tanah biasanya mengundang kerawanan suap antara penegak hukum dan yang berperkara.

Diungkapkan Johan, para penegak hukum yang menangani sengketa tanah, biasanya bertransaksi di luar gedung pengadilan. Isu ini jadi perhatian mantan juru bicara KPK tersebut. "Pada kasus-kasus sengketa tanah, biasanya mereka minta di luar gedung pengadilan. Ini harus dibarengi dengan integritas para hakim yang menangani perkara," tutupnya.

Masih di Surabaya, Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukriato menyorot soal over kapasitas Lapas Jatim yang sudah mencapai 107 persen. Kapasitasnya tersu disesaki para narapidana narkoba. Situasi kelebihan kapasitas ini sudah berlangsung lama.

Didik menyampaikan ini kepada *Parlementaria* di sela-sela pertemuan

dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Imam Jauhari, Kamis (11/5/2023) silam. Ternyata, pemakai narkoba di Lapas tersebut cukup banyak. "Lapas selalu jadi perhatian kita. Kelebihan kapasitas di Jatim masih relatif besar, 107 persen. Kelebihan kapasitas ini banyak diisi napi-napi kasus narkoba, baik bandar maupun pengguna," katanya.

Menurut Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR itu, perlakuan hukum terhadap narapidana pengguna dan bandar narkoba mestinya dibedakan. Para bandar memang harus dihukum berat. Sementara para pengguna harus direhabilitasi. Para pengguna sebenarnya adalah korban. Penyatuan bandar dan pengguna dalam satu Lapas, merusak mental para narapidana pengguna. Harusnya mereka dijauhkan dari para bandar.

Pada bagian lain Didik mengemukakan, peredaran narkoba di dalam Lapas sebetulnya bukan barang baru. Hampir di setiap Lapas terjadi penyelundupan narkoba dengan segala cara. Tinggal bagaimana mengawasi setiap narapidana dan tamu yang datang. Sistem pengamanan Lapas mungkin perlu dievaluasi.



FOTO: HUSEIN/NR

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto saat foto bersama usai pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim.

Sementara di Lampung, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memimpin kunjungan kerja reses untuk mengevaluasi penanganan perkara tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2022-2023 oleh Kejaksaan Tinggi Lampung.

Evaluasi dilakukan dalam lingkup serapan anggaran, progress, optimalisasi kinerja, peningkatan

pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta upaya peningkatan sinergitas dan kerja sama terpadu antarpenejak hukum. "Pelaksanaan agenda reformasi kultur dan struktur kelembagaan di bidang hukum masih belum efektif dan terkendala," ungkap Sahroni di kantor Kejaksaan Tinggi Lampung, Jumat (14/4/2023) silam.

Meskipun demikian, menurut pandangan Komisi III, ada perkembangan penanganan perkara Tipikor di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung, yang saat ini telah mengalami peningkatan. Terbukti dengan banyaknya perkara yang telah naik ke tahap penyelidikan dan telah dilakukan penahanan terhadap beberapa tersangka tindak pidana korupsi.

Dalam kunjungan ini, rombongan tim kunjungan kerja reses Komisi III menyambangi Kejati Lampung, yang turut disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Nanang Sigit Yulianto, beserta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung, Sorta Delima Lumban Tobing. **mh, ssb/mh**



FOTO: JIWA/NR

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni saat memimpin Kunres di kantor Kejaksaan Tinggi Lampung.

# Menyerap Beras Lokal, Antisipasi El Nino



FOTO: LULU/ANR

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat memimpin Kunker Komisi IV DPR RI ke Gudang Bulog Sukoharjo.

**Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menyerukan penyerapan beras lokal harus maksimal. Selain untuk meningkatkan ketersediaan pangan juga untuk mengantisipasi fenomena El Nino. Serapan beras lokal ini sekaligus untuk menganalisis dampak El Nino terhadap ketersediaan pangan di berbagai wilayah yang terdampak dan menyusun strategi mengatasi masalah tersebut.**

“Tadi dijelaskan penyerapan beras lokal masih 30 persen dari hasil panen raya kemarin, dan masih ada lagi 70 persen yang harus diserap. Maka, harus ada penanganan khusus atau strategi khusus untuk bisa memastikan ketersediaan pangan itu aman. Jadi, (penyerapan) ini

harus dimaksimalkan kembali,” ungkap Anggia kepada Parlementaria saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Gudang Bulog Sukoharjo, Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (11/5/2023) lampau.

Politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan persoalan ketersediaan stok pangan ini akan dibahas lebih

lanjut pada agenda rapat Komisi IV untuk mengetahui bagaimana cara mengantisipasi ketersediaan pangan. Apalagi, ada momentum Iduladha pada Juni, sehingga kebutuhan bahan pokok dipastikan meningkat, seperti terjadi pada Idulfitri lalu.

Anggia menambahkan, perlu juga disusun program bantuan pangan untuk daerah yang terdampak EL-Nino. Bantuan itu berupa distribusi pangan tambahan, subsidi untuk harga pangan, atau bantuan langsung kepada petani yang terdampak. Para petani juga diharapkan melakukan diversifikasi pertanian dengan menanam varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kekeringan. Selain itu perlu pula mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

“Kami meminta fokus pada

ketersediaan pangan dalam menghadapi El Nino. Ini merupakan langkah proaktif untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak buruk yang mungkin terjadi terhadap pasokan pangan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, petani, dan lembaga terkait akan menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan selama masa El Nino dan perubahan iklim secara keseluruhan," tutupnya.

Di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mendorong RUU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) mencantumkan klausul mengenai daerah penghasil oksigen untuk mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari APBN. Menurutnya, ke depannya tidak ada yang mau menjadi kepala daerah di wilayah-wilayah yang memiliki mayoritas wilayah hutan atau perkebunan, lebih baik di daerah industri.

"Dari dana bagi hasil pajak ke daerah-daerah, kita buat pemimpin daerah itu bahagia merawat dan menjaga konservasi lingkungan. Ini hal yang harus dilakukan agar kita memiliki tujuan yang sama dalam merawat lingkungan ke depan untuk



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat memimpin Tim Kunker Reses Komisi IV DPR RI.

anak dan cucu kita. Kondisi hari ini, aliran air yang berada dari dataran tinggi di sini itu kencang ke bawah, karena sudah tidak ada lagi penghalang dan airnya mulai tegerus ke daerah Sagalaherang, bahkan sampai Purwakarta. Sungai Cipunagara juga jumlah luapannya sangat tinggi karena penambangan liar sudah sangat luar biasa," ujar Dedi, Kamis (11/5) silam.

Legislator Dapil Jabar VII ini berharap, ke depan segera ada rencana yang memadai untuk melakukan *recovery* lingkungan. Ia menekankan semua menginginkan

ekonomi tumbuh dengan baik, tapi jangan pernah melupakan terjaganya konservasi. Terpeliharanya ekologi dan lingkungan yang tertata tetapi keindahannya tidak boleh hilang.

"Kita harus belajar bagaimana hancurnya daerah Puncak Bogor, kita harus belajar juga bagaimana rusaknya Bandung Utara. Menurut saya, kerusakan itu tidak boleh bergeser ke sini di Kabupaten Subang. Saya yakin bisa dijaga. Mudah-mudahan karena Pak Bupati Subang itu latar belakangnya adalah orang pertanian," harapnya.

Politisi F-Golkar ini menambahkan, kalau Subang yang masuk wilayah selatan sudah berkembang dengan baik dengan menjaga alamnya, nanti dari wilayah utara yang sudah berubah peruntukkan menjadi pusat industri. Sehingga, kesejahteraan para pekerja industri itu akan mengalir juga ke wilayah selatan Subang itu.

"Tapi kalau selatan rusak, mereka buang uangnya akhirnya ke luar. Terkait wacana dana bagi hasil ini, sudah kita masukkan dalam hasil keputusan Rapat Kerja Komisi IV. Sehingga, daerah seperti Tangkuban Perahu di Subang ini akan mendapatkan dana besar untuk pemeliharannya," tutupnya.

[upi.jk/mh](https://www.upi.com)



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat memimpin Tim Kunker Reses Komisi IV DPR RI.

# Meninjau Persiapan Arus Mudik

Komisi V DPR RI pada pertengahan April lalu, giat mengawasi arus mudik lebaran 2023. Semua infrastruktur transportasi ditinjau untuk melihat dari dekat akses masyarakat terhadap semua moda transportasi mudik.

**W**akil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae mengapresiasi kesiapan PT

Kereta Api Indonesia (PT KAI) dalam menyiapkan arus mudik lebaran 2023 via kereta api. Hal itu diungkapkan Ridwan usai menerima penjelasan dari PT KAI dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Stasiun Pasar Senen, Jumat (14/4/2023) lampau.

"Setelah masa pandemi ini kita lihat kesiapan mereka begitu siap. Dalam artian bahwa dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya, mereka telah menyiapkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada," ungkap Ridwan. Ia berharap, seluruh *stakeholder* yang mengoordinasi para pemudik, baik yang menggunakan kereta api, kendaraan umum, atau pribadi, pesawat ataupun kapal harus menjaga para pemudik dengan baik, terutama keselamatannya.

"Yang utama itu keselamatan para pemudik, yang kedua adalah keamanannya, dan yang ketiga



FOTO: EKI/IR

Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae bersama rombongan tim saat meninjau Stasiun Pasar Senen.

adalah persoalan kenyamanan mereka," tegas Ridwan. Dari segi keselamatan, legislator Fraksi Partai Golkar itu berharap, tidak lagi ada cerita kecelakaan penumpang seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Sementara dari segi keamanan, ia berharap tidak terjadi pelecehan maupun pencurian di dalam kereta.

"Dari segi kenyamanan, misalnya, bagaimana masyarakat bisa tidur di gerbong dengan baik, dengan tenang. Kemudian infrastruktur jalan yang ada juga cukup baik, sehingga ketika kendaraan lewat, kereta lewat tidak ada kendala apapun," terang Ridwan. Secara keseluruhan, ia mengaku bersyukur pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR telah mematangkan jalan nasional sepanjang 4.812 kilometer. Menurutnya, itu bisa menjadi indikator bahwa pemerintah melakukan upaya terbaik menyiapkan mudik lebaran.

"Tapi kami di Komisi V tetap berharap pemerintah tidak lengah walaupun kesiapan jalan sudah sangat bagus, kemudian pelayanan sudah sangat bagus, tetapi harus tetap dijaga dan dicari formulasinya, sehingga kenyamanan dan keamanan itu semakin bisa dirasakan oleh masyarakat," pungkas Ridwan.

Sementara di Bandung, Jawa Barat, Komisi V DPR meninjau Terminal Leuwi Panjang dan Stasiun Bandung. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras yang memimpin kunjungan ini, memfokuskan pada persiapan angkutan Lebaran 2023 di sektor angkutan darat, seperti moda kereta api, bus, maupun transportasi pribadi seperti mobil dan motor yang melewati jalan raya.

"Kami menilai bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras saat memimpin Kunres Komisi V DPR RI di Bandung.

tujuan dan lintasan utama mudik Lebaran 2023," ungkap Andi Iwan kepada *Parlementaria* di Bandung, Jumat (14/4/2023) lampau. Berdasarkan hasil survey Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan penumpang secara rasional pada masa lebaran 2023 adalah 45,8 persen atau 123,8 juta orang.

Dari jumlah itu, potensi pergerakan terbanyak di Pulau Jawa dengan 62,5 persen atau 77,3 juta orang. Secara rinci, perjalanan melalui moda darat diperkirakan sebanyak 75 persen dari total seluruh perjalanan, dengan persentase penggunaan mobil pribadi sebanyak 22,07 persen, sepeda motor sebanyak 20,30

persen, dan bus sebanyak 18,39 persen. Sementara, pilihan utama jalur mobil adalah Tol Trans Jawa sebanyak 33,53 persen, termasuk melewati wilayah Provinsi Jawa Barat.

Di Banten, delegasi Komisi V DPR meninjau Tol Merak. Anggota Komisi V DPR Hamka Baco Kady mengapresiasi persiapan pemerintah dan mitra dalam mengatasi lonjakan pemudik jalur darat via Tol Merak, Banten. Hal ini ia sampaikan kepada *Parlementaria* usai meninjau langsung Tol Merak dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi V ke Banten, Jumat (14/04/2023) lampau.

"Ini tiap tahun, kan, pekerjaan rutin bagi setiap lembaga, utamanya yang bergerak di bidang jasa

pengangkutan. Pertama, di Merak ini yang kami lihat pada prinsipnya persiapan-persiapan dasarnya sudah oke, cuma saya harus memperjelas dulu apa yang berbeda dengan tahun lalu. Yang pertama adalah rest area-nya itu ditambah. Kedua, alur keberangkatan itu dibagi dua, reguler dengan business. Sehingga, semua persoalan yang bisa terjadi itu terselesaikan dengan baik," ujar politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Hamka menilai, setiap tahun perlu dilakukan perubahan yang signifikan agar bisa menyelesaikan persoalan kemacetan karena volume kendaraan yang bertambah. Salah satunya dengan menyiapkan skenario A, B, dan seterusnya. Agar jika salah satu plan tidak berjalan, mitra bisa mengeksekusi plan lain, sehingga tidak mengganggu kelancaran mudik lebaran tahun ini.

"Harus ada plan A, plan B. Kalau terjadi crowded, misalnya, mulai dari awal start-nya mobil dari pintu tol itu sudah harus diatur sedemikian rupa. Karena antara outflow dengan inflow itu tinggi sekali perbedaannya. Sehingga, kalau tidak diatur antara outflow dan inflow-nya, kendaraan yang masuk itu akan numpuk. Oleh karena itu, semua planning seperti ini, sudah dipersiapkan, ada alternatif yang dilakukan, terutama jalur-jalurnya perlu penambahan pelabuhan penumpang. Jadi, sudah ada dua tempat selain yang ada di sini. Ada satu tempat lainnya, sehingga tidak terjadi penumpukan," jelas Hamka.

Terakhir, Hamka mengingatkan kepada pengelola untuk bisa memaksimalkan plan A dan plan B yang telah dibuat, dan melakukan koordinasi dalam menguraian Inflow dan outflow untuk mengatasi penumpukan kendaraan selama masa mudik lebaran. Ia berkeyakinan bahwa selalu ada perubahan yang lebih baik dari tahun ke tahun soal pengelolaan kemacetan ini. — eki, rnm, syn/mh



Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady (tengah) saat meninjau langsung Tol Merak.

# Mengapresiasi BUMN Hadapi Mudik Lebaran 2023



FOTO: ODI/NR

Ketua Tim Kunres Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan di Bandung.

## Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengapresiasi kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menghadapi arus mudik dan arus balik libur lebaran, Idulfitri 1444 H/2023 M.

**D**i Bandung, Jawa Barat, Komisi VI mendapatkan informasi progres pembangunan jalan Tol Cisumdawu dan evaluasi kinerja BUMN pada Hari Raya Idulfitri 2023 di Jawa Barat. "Secara umum, saya melihat gelombang arus mudik maupun arus balik saat libur lebaran tahun ini berjalan baik. Hal ini tidak lepas dari kinerja BUMN yang bekerja sama dengan pihak terkait, sehingga semua bisa berjalan lancar," ungkap Martin di Bandung, Selasa (2/5/2023) lalu.

Politisi Partai Nasdem ini menambahkan terdapat tiga hal

yang menentukan kelancaran mudik, seperti kesiapan prasarana/ infrastruktur, pengaturan lalu lintas, dan perilaku pengemudi. "Dari sisi prasarana, Tol Cisumdawu sudah siap dimanfaatkan secara fungsional. Dari Cimalaka sampai Dawuan dibuka dua lajur secara gratis untuk arus mudik lebaran 2023 ini," tambah Martin.

Legislator Dapil Sumatera Utara II ini menjelaskan bahwa jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) Seksi 4-Seksi 6 (Cimalaka-Dawuan) sepanjang 29,3 km sudah difungsionalkan untuk arus mudik dan arus balik lebaran 2023 ini. Sebelumnya, pada Desember

2022 lalu, Tol Cisumdawu seksi 1-3 dari Cileunyi ke Cimalaka sepanjang 32,5 km telah beroperasi. Dengan demikian, Tol Cisumdawu telah tersambung utuh sepanjang 62 km dari ruas tol Cipularang hingga ruas Tol Cipali.

"Setelah arus mudik, ditargetkan seluruh ruas Tol Cisumdawu dapat rampung dan mulai beroperasi penuh pada Juni 2023. Berdasarkan data yang kami terima, akhir Mei atau selambat-lambatnya awal Juni 2023, semua ruas Tol Cisumdawu 62 km sudah operasional, sekaligus untuk mendukung operasional Bandara Kertajati," urai Martin.

Di Surabaya, Jawa Timur, Anggota Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo mengapresiasi kinerja PT. Kereta Api Indonesia (KAI) dalam menyediakan fasilitas pelayanan selama periode angkutan lebaran 2023. Program-program menarik yang ditawarkan PT. KAI menjadi salah satu faktor pendukung kepuasan pelayanan pelanggan. Hal ini terlihat dari beberapa testimoni atau dokumentasi atas pemanfaatan layanan fasilitas penumpang.

"Sebagai contoh di Stasiun Surabaya Gubeng adanya water station itu menurut saya hal bagus. Ini semestinya dilakukan terus menerus, ya tidak hanya sesaat pada momen tertentu saja dan tersedia juga di stasiun-stasiun kereta api lainnya. Tentu dengan adanya water station ini PT. KAI juga bisa mendapatkan pendanaan dari kerja sama dengan pihak sponsor produk water station tadi. Tentu hal ini dapat menguntungkan bagi PT. KAI," jelas Eko, Selasa (2/5/2023) lalu.

Lebih lanjut politisi dapil DKI Jakarta I itu mengungkapkan, berkaca dari penurunan jumlah penumpang

pada tahun 2019, di tahun 2023 ini PT. KAI harus lebih aktif dalam melakukan penjualan tiket dengan mengedepankan unique selling point dalam promosi penjualannya. "PT. KAI harus 'mengejar bola' bukan hanya menunggu. Harus ada teknik marketing yang aktif juga melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam mempromosikan penjualan tiket. Misalnya, aktif memberikan diskon, sehingga masyarakat tertarik beli tiket," tandas politisi Fraksi PAN itu.

Eko menambahkan, perlu juga ada penguatan pada sistem digitalisasi untuk menghindari trouble access pada aplikasi, sehingga dapat meminimalisasi percaloan. Pasalnya, masyarakat banyak yang mengakses tiket dan informasi dengan aplikasi. Pada kesempatan yang sama Dirut PT. KAI (Persero) Didiek Hartantyo menuturkan realisasi program angkutan lebaran 2023, KAI Group secara total menyediakan kapasitas sampai 6,9 juta tempat duduk untuk KA jarak jauh dan lokal atau 136 persen dibandingkan realisasi angkutan lebaran 2022.

Dalam arus balik, KAI juga membuka subkelas tarif rendah, yakni subkelas J, I, dan H pada kelas eksekutif hingga 3 Mei 2023. Subkelas tersebut dijual KAI saat low season.



FOTO: TIARA/NR

Anggota Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo saat mengikuti pertemuan.

Bila dibandingkan tarif batas atas, subkelas tersebut dapat dikatakan lebih murah 20 hingga 30 persen dari tarif biasanya. "Pembukaan penjualan tiket subkelas dengan tarif rendah pada arus balik ini juga mendukung imbauan pemerintah, agar masyarakat tidak terfokus melakukan perjalanan balik pada 24 dan 25 April," tutupnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Evita Nursanty mengapresiasi pembangunan tahap satu Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Menurutnya, KITB yang merupakan Proyek Strategis Nasional diharapkan mendorong perekonomian masyarakat khususnya di Jawa Tengah. Menurutnya, dengan KITB,

diproyeksikan dapat menyerap 282 ribu tenaga kerja.

Persoalan KITB tersebut dibahas Eva dalam pertemuan Komisi VI DPR dengan Kementerian BUMN, Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT. Perkebunan Nusantara beserta *stakeholder* lainnya, Selasa, (2/5/2023) lalu, di Semarang, Jawa Tengah. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, kawasan tersebut berpotensi menyerap 130.000 lapangan kerja baru pada tahap satu.

la menilai, lapangan kerja yang luas ini harus mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat Jawa Tengah, terutama di Kabupaten Batang. "Ini bukan angka yang kecil dan harus dipersiapkan dengan matang. Saya berharap tenaga kerja ini wajib diutamakan yang dari Batang, Jawa Tengah. Jangan masyarakatnya hanya menjadi penonton. Jadi, mereka harus diutamakan dalam penyerapan tenaga kerja," seru Evita.

la mengungkapkan program tersebut awalnya hanya memiliki puluhan ribu nasabah dan sekarang sudah mencapai 14,3 juta. "Jadi ini suatu program yang harus kita akui adalah program yang sukses, benar-benar membina UMKM ultra mikro," ucapnya. — oji, tra, ann/mh



FOTO: ANNE/NR

Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty saat mengikuti pertemuan dengan beberapa mitra kerja.

# Mempersoalkan Angkutan Batubara di Daerah



FOTO: AGUNG/NIR

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno saat mengikuti pertemuan di Rumah Dinas Gubernur Jambi.

**Angkutan batubara di daerah jadi isu menarik yang dipersoalkan Komisi VII DPR RI. Pada kunjungan kerja ke Provinsi Jambi, Komisi VII melihat, angkutan batubara yang mengakses jalan-jalan publik telah menimbulkan kemacetan.**

**W**akil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengimbau agar seluruh pihak berdiskusi untuk memperoleh solusi terbaik dalam memecahkan masalah tersebut. "Pertemuan kali ini kami lakukan dengan pemerintah daerah Jambi dipimpin oleh gubernurnya langsung dengan mengajak pelaku usaha tambang dan juga pengembang jalan khusus batubara," terang Eddy usai pertemuan yang bertempat di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat (5/5/2023) silam.

Transportasi batubara di Jambi masih memakai fasilitas jalan umum.

Beberapa waktu lalu, tepatnya akhir Februari 2023, terjadi kemacetan parah selama 22 jam di jalan lintas Tembesi-Sarolangun, Jambi. Bahkan, kemacetan ini juga mengakibatkan korban jiwa. Hal ini disinyalir karena penumpukan volume kendaraan yang didominasi truk pengangkut batubara.

"Maka kita cari solusi bagaimana kita bisa melaksanakan percepatan pembangunan jalan, supaya ada solusi jalur khusus batubara. Sehingga, mengurangi beban jalan nasional, dimana jalan nasional itu masih bisa difungsikan secara terbatas agar perekonomian masyarakat yang tinggi di sektor

pertambangan ini bisa jalan, dan perekonomian daerah juga bergerak," urai Eddy.

Apalagi, Indonesia diketahui masih memiliki cadangan batubara yang cukup banyak sekitar 38,8 miliar ton dengan umur cadangan mencapai 65 tahun. Dari pertemuan ini diuraikan bagaimana sektor tambang itu juga memiliki dampak positif bagi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan batubara secara bijak dan efisien dari hulu hingga hilir.

Politisi Fraksi PAN itu pun menjelaskan bahwa dalam pertemuan kali ini pihaknya mendapatkan banyak masukan. Ia

pun mengapresiasi kerja pemerintah provinsi dan mengingatkan agar pelaku usaha tambang di Jambi dan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan segala kewajibannya.

"Apa yang dilakukan Pemprov sudah maksimal dan kami dukung itu. Kami turut mengimbau pelaku usaha agar melaksanakan kewajibannya, apakah itu *CSR (Corporate Social Responsibility)* maupun pelaksanaan DMO (Domestic Market Obligation), termasuk bagi mereka yang berkomitmen membangun jalur khusus (batubara) itu," terang Eddy.

Sedangkan di Sumatera Selatan (Sumsel), Komisi VII menyorot soal lain. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi berharap permasalahan penggantian lahan warga yang terimbas proyek pengerjaan survei seismik 3D ABAB oleh PT Daqing Citra di Sumsel sebagai pemenang lelang, dapat dilakukan secara persuasif dan damai.

"Kami tadi mendapat penjelasan dari Pihak PT Daqing Citra sebagai pelaksana pengerjaan proyek survei seismik 3D ABAB Sumatera Selatan bahwa pengeboran sumber minyak baru masih sebelas persen. Hal itu karena masih ada beberapa permasalahan seperti penggantian lahan warga yang terkena proyek. Sehingga, cukup menghambat pengerjaan proyek tersebut," jelas Bambang di Palembang, Sumsel,



FOTO: AYU/NR

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi saat bertukar cenderamata usai pertemuan.

Jumat (5/5/2023) lalu.

Menurut Bambang, masyarakat juga memiliki hak atas lahan yang sudah ditinggalinya selama bertahun-tahun. Meski demikian, lanjutnya, pengerjaan proyek survei seismik 3D ABAB ini juga tidak kalah pentingnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Mengingat kebutuhan energi (minyak) dalam negeri yang sangat tinggi. Sementara cadangan minyak kita terbatas. Sehingga, butuh eksplorasi sumber-sumber atau sumur minyak baru.

Pemerintah sendiri telah menargetkan lifting minyak sebesar 1 juta barel per hari yang hingga saat ini masih jauh dari

target. "Sempat dijelaskan juga bahwa harga pengganti lahan warga itu berdasarkan Peraturan Gubernur Sumsel Tahun 2017. Artinya, sudah berusia lebih dari lima tahun yang lalu. Tentu sangat wajar jika warga minta harga penggantian lahannya disesuaikan dengan harga dan kondisi saat ini," ungkap politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Dengan penyelesaian secara kekeluargaan dan damai ini, ia berharap masyarakat tidak merasa dirugikan, dan proyek tersebut pun dapat berjalan sesuai rencana. Sehingga, ke depan sumur baru itu akan meningkatkan lifting minyak dalam negeri secara keseluruhan. Sekaligus membantu kekurangan kebutuhan domestik.

Untuk diketahui proyek survei seismik 3D ABAB ini merupakan salah satu proyek pengeboran sumur baru oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Sumsel, yang ditujukan untuk meningkatkan lifting minyak sebagaimana yang ditargetkan pemerintah sebesar satu juta barel per hari. Dalam pelaksanaannya PT PHR memilih PT Daqing Citra yang sahamnya 65 persen dimiliki China dan 35 persen Indonesia itu sebagai perusahaan pemenang lelang.

**aha, ayu/mh**



FOTO: AYU/NR

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi saat bertukar cenderamata usai pertemuan.

# Memutakhirkan Data Kemiskinan, Mendistribusikan Bansos

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tb. Ace Hasan Syadzily menyerukan agar terus dilakukan pemutakhiran data terhadap penerima bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Tujuannya, supaya bantuan sosial itu tepat sasaran, mengingat bantuan itu bersifat pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat.

“**K**arena tujuannya untuk dapat meningkatkan ekonomi, jadi jangan sampai bantuan habis di modal saja,” ujar Ace dalam kunjungan kerja Komisi VIII DPR di Sentra Alyatama Kota Jambi, Selasa (9/05/2023) lalu, seraya menambahkan, “Kami dari Komisi VIII DPR terus dorong kebijakan yang pro masyarakat. Kami berikhtiar menjadikan masyarakat yang sejahtera,” sambung Ace.

Komisi VIII DPR RI bersama Kemensos menyalurkan bantuan senilai Rp179 miliar bagi para keluarga penerima manfaat (KPM) di Jambi. Secara simbolis, bantuan tersebut diserahkan Ace dengan didampingi Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Jambi, Hasan Basri Agus (HBA).

Bantuan tersebut terdiri dari bantuan PKH tahap 1 senilai



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tb. Ace Hasan Syadzily saat menyerahkan bantuan bersama Kemensos.

Rp73.298.525.000 yang diperuntukkan kepada 101.024 KPM, dan bantuan tahap 2 senilai Rp69.089.050.000 kepada 95.289 KPM. Kemudian bantuan atensi senilai Rp2.222.029.100 dan bantuan sembako/BPNT tahap 2 senilai Rp34.837.400.000 kepada 174.187 KPM.

“Di Jambi tingkat realisasinya cukup tinggi. Bahkan, untuk bantuan tahap 1 realisasinya sudah hampir 100 persen,” kata Royani yang didampingi Viking Rizarta selaku kepala Sentra Alyatama Jambi. Royani menambahkan, untuk penyaluran bantuan tersebut Kemensos juga bekerja sama dengan Bank Himbara dan Kantor Pos. “Kerja sama ini kita lakukan untuk meminimalisir kendala-kendala saat penyaluran,” tandasnya.

Sementara di Kota Batam, Kepri, Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menekankan, langkah awal sekaligus kunci dari upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah melakukan validasi data. Untuk itu, ia meminta masyarakat Kota Batam mendukung proses

validasi data tersebut.

“Bapak Ibu, kalau punya tetangga, misalnya, tadi yang mendapatkan bantuan kursi roda sementara ada tetangganya yang sama kebetulan difabel dan tidak dapat, maka hari ini Bapak Ibu bisa langsung melapor ke command center Kemensos,” ajak Maman usai menyerahkan bantuan Kemensos untuk penyandang disabilitas di Kota Batam, Kamis (11/5/2023) lalu.

Maman kemudian menyinggung masyarakat yang tidak mau dilakukan pendataan, karena merasa kondisi disabilitas merupakan sebuah kutukan. Ia menjelaskan bahwa pemikiran tersebut keliru. Ia mengatakan, setiap manusia memiliki tiga fitrah, yakni fitrah kebenaran, fitrah kebaikan, dan fitrah keindahan.

“Kata Bu Selly (Anggota Komisi VIII), setiap anak yang lahir itu memiliki keistimewaan. Maka, kita syukuri. Dan kalau ada sesuatu yang bisa dibantu oleh negara, ibu kasihkan datanya melalui PKH (pendamping keluarga harapan) dan sebagainya,”

ujar politisi Fraksi PKB itu.

Maman menambahkan bahwa Komisi VIII DPR akan terus mendukung Kemensos agar terus meningkatkan program bantuannya. Bukan sekadar bantuan sosial tetapi juga program pemberdayaan agar masyarakat bisa mandiri dan berdikari.

"Saya punya tetangga yang difabel. Kemudian kita bikinin yang namanya green house. Dia setiap hari memelihara cabainya dan offtaker-nya itu. Dia bisa jualan sehari sampai 10 kilogram, Ibu-ibu. Dan dia bangga. Jadi, tidak ada kata berhenti untuk menghadapi hidup ini kecuali dengan kata semangat," tegasnya.

Terakhir, Maman menyampaikan bahwa semua program dari Kemensos membutuhkan sinergitas. Ia bersyukur Wali Kota Batam dan Sekda Kota Batam sangat terbuka untuk itu. "Saya tadi melihat trotoarnya. Untuk menunjukkan keberpihakan kota Batam terhadap penyandang disabilitas terutama yang tidak melihat atau tunanetra, maka lihat saja di trotoar itu sudah ada yang dicat kuning (jalur khusus disabilitas). Itu merupakan bukti pemerintah memiliki keberpihakan kepada masyarakatnya," ujar Maman.

Sementara di Kulon Progo,



FOTO: EKI/NR

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq saat menyerahkan Bantuan dari Kemensos.

Yogyakarta, Komisi VIII DPR RI mengunjungi Kapanewon Samigaluh yang merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kulon Progo, Yogyakarta. Anggota Komisi VIII MY Esti Wijayanti mengatakan, kunjungan ini untuk melihat dari dekat tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

"Karena data yang kami terima, termasuk tadi kami coba cek langsung kepada Kepala Bappeda, memang angka stunting di Kecamatan Samigaluh ini cukup

tinggi, rata-rata 15-16 persen, ada 176 anak. Lalu, data kemiskinan Kulon Progo, untuk di Kapanewon Samigaluh atau keseluruhan Kulonprogo ternyata memang di atas rata-rata nasional dan rata-rata DIY," ujar legislator Dapil DIY tersebut, di Kulon Progo, DIY, Senin (8/5/2023) lalu.

Menurut Esti, angka kemiskinan yang masih tinggi di Kulon Progo, salah satunya disebabkan belum didukung oleh infrastruktur yang memadai. Padahal, hal tersebut merupakan salah satu aspek mendasar. Selain itu, ketersediaan air bersih juga masih belum terpenuhi secara maksimal.

Kemudian, soal tingginya angka stunting di Kapanewon Samigaluh, Esti mengatakan, itu karena masih rendahnya rata-rata lama sekolah. Sehingga, infrastruktur pendidikan juga dinilai penting untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Katanya, sudah dicoba kaji oleh BKKBN juga, mengapa itu kemudian terjadi stunting. Rata-rata sekolahnya rendah karena kemungkinan langsung menikah lulus SMP," lanjutnya. — man, eki, bia/mh



FOTO: BIANCA/NR

Anggota Komisi VIII MY Esti Wijayanti.

# Mengapresiasi PT. Freeport Bangun Rumah Sakit

Komisi IX DPR RI secara khusus mengapresiasi PT. Freeport yang telah membangun rumah sakit (RS) untuk masyarakat lokal di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Pembangunan RS dibiayai dari anggaran *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Masyarakat setempat kian mendapat perhatian.



FOTO: PUNTHO/NR

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena beserta rombongan tim saat kunjungan lapangan ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat.

**W**akil Ketua Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena menyampaikan hal tersebut saat memimpin tim kunjungan kerja Komisi IX ke Papua Tengah, Sabtu (15/4/2023) lalu. Menurut Melki, pembangunan RS ini sekaligus membuktikan bahwa Freeport merupakan bagian dari Indonesia.

"Di bidang kesehatan juga luar biasa, dia punya fungsi sosial yang luar biasa ya. Dari berbagai tempat bisa diurusin mulai dari agama, kebudayaan, olahraga, pendidikan, ekonomi, kesehatan, semuanya dibantu oleh PT. Freeport," puji Melki saat diwawancara *Parlementaria*. Turut hadir Executive Vice President PT. Freeport Indonesia Agung Laksamana, Staf Ahli Menkes, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, Komisi IX DPR RI

menggelar kunjungan lapangan ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat di Timika milik PT. Freeport Indonesia. Pada kesempatan itu, Melki mengapresiasi peran tenaga kesehatan (nakes) yang sudah bekerja dengan sangat keras membantu pemerintah yang didukung PT. Freeport dalam melayani masyarakat tujuh suku dan masyarakat umum dalam menjaga kesehatan di Timika.

"Kami melihat dan mendengarkan dari teman-teman dokter dan tenaga kesehatan yang lain bahwa RS Mitra Masyarakat ini menjadi RS yang sejak dulu menjadi rujukan kesehatan kita bagi keluarga besar kita, masyarakat kita yang ada di Timika ini. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada PT. Freeport yang terus mendukung rumah sakit ini bisa membantu masyarakat 7 suku dan masyarakat yang ada di sekitar Timika ini," tandas legislator Fraksi Partai Golkar ini.

Khusus sektor kesehatan, dalam

Program Pengembangan Masyarakat, PT. Freeport Indonesia telah membangun dan mengoperasikan RS dan klinik untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis. Tercatat, 120.000 kunjungan pasien ke RS Mitra Masyarakat selama tahun 2022. Lalu, pengobatan gratis di 3 klinik umum, 2 klinik spesialis dengan 43.500 kunjungan.

Tak hanya itu, melalui Program Pengembangan Masyarakat PT. Freeport Indonesia itu, 13.500 rumah telah mendapat pelayanan Indoor Residual Spraying (IRS). PT. Freeport Indonesia juga telah menggelar sosialisasi dan pelatihan kesehatan terkait malaria, HIV, TB, Covid-19, dan lainnya kepada lebih dari 30.000 peserta selama tahun 2022.

Sementara di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, delegasi Komisi IX DPR RI dipimpin waki ketuanya Nihayatul Wafiroh meninjau balai latihan kerja (BLK). Ia menilai, potensi BLK Komunitas Yayasan Del



FOTO: KIKI/NR

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat meninjau Balai Latihan Kerja Komunitas Yayasan Del.

sangat bagus untuk menghasilkan masyarakat yang terampil di bidang teknologi digital.

Pada dasarnya, BLK merupakan sarana pelatihan untuk mendapatkan keterampilan bagi yang ingin mendalami keahlian di bidangnya masing-masing. "Potensi BLK ini bagus, karena yang menjadi peserta pelatihan bukan hanya berasal dari yayasan, melainkan juga dari masyarakat sekitar yang bergerak di bidang UMKM untuk lebih melek digital," kata Ninik, sapaan akrabnya, di Kantor Bupati Kabupaten Toba, Senin, (8/5/2023) lalu.

Ke depan, Ninik berharap, perlu dibangun BLK yang bisa memfasilitasi keahlian dalam bidang bahasa asing, seperti, Bahasa Inggris, Bahasa Jepang, dan Bahasa Korea. Mengingat, Toba ini ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas pada 2021 oleh Presiden Joko Widodo,

"Toba ini menjadi tujuan wisata. Oleh sebab itu kita harus mengimbanginya dengan kesiapan tenaga kerja kita. Jangan sampai penduduk sekitar menjadi penonton di tanahnya sendiri, yang hanya menyewakan lahan, menjadi

tukang parkir. Itu tidak menambah pendapatan mereka," sebutnya.

Ninik meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membentuk tim khusus dengan melibatkan pemerintah daerah setempat beserta lembaga penerima bantuan BLK untuk mempercepat pembangunan balai-balai pelatihan kerja dengan berbagai bidang kejuruan.

Sedangkan, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat memimpin delegasi Komisi IX DPR ke Denpasar, Bali, menyerukan agar pemerintah pusat dan daerah bersinergi menangani pekerja migran Indonesia (PMI). Seruan ini disampaikan Felly menyusul kasus PMI ilegal yang masuk Kamboja.

"Perlu ada sinergitas pemerintah. Jangan sampai terjadi lagi kasus modus penipuan PMI seperti di Kamboja beberapa hari silam," kata Felly saat diwawancarai *Parlementaria* usai memimpin kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (8/5/2023) lalu. Politisi Fraksi Partai Nasdem itu mengungkapkan bahwa permasalahan calon PMI berawal dari iklan-iklan liar yang menjerumuskan para PMI. — pun, qq, cas/mh



FOTO: CHASBI/NR

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat memimpin pertemuan.

# Menyoal Kembali Seleksi PPPK Guru



FOTO: DEP/ NR

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda saat memimpin Kunjungan Komisi X DPR RI di Purwakarta.

**Dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, persoalan pengangkatan guru PPPK kembali diangkat. Masih banyak keluhan dari daerah menyangkut nasib para guru yang belum diangkat menjadi PPPK.**

**“K**ita konsen di semua bidang yang terkait dengan mitra komisi, baik pendidikan, kepariwisataan, ekonomi kreatif, dan perpustakaan. Tadi kita belanja banyak masalah yang disampaikan oleh para UPD di sini. Apa yang menjadi keluhan ini memang di berbagai tempat kira-kira sama. Artinya, ini masalah nasional tidak hanya masalah Purwakarta,” kata Syaiful Huda saat memimpin kunker

Komisi X DPR di Purwakarta, Jumat (14/4/2023) lampau.

Ia menjelaskan, ada beberapa masalah yang turut dibahas dalam pertemuan tersebut, diantaranya menyangkut seleksi PPPK guru. Kuota untuk PPPK guru ternyata masih banyak. Tapi, kebijakan di pusat masih belum jelas. Persoalan ini membutuhkan persamaan persepsi antara Kemendikbud, BKN, dan Kemenpan-RB.

Terkait dengan masalah kekurangan guru PNS di Kabupaten

Purwakarta, Huda menegaskan, Bupati Purwakarta sempat menyampaikan, ketersediaan guru di Kabupaten Purwakarta sudah cukup, cuma yang berstatus PNS memang masih kurang. “Tadi ada aspirasi dari Kadisnya supaya jangan diskriminatif. Selama ini rekrutmen hanya untuk PPPK dan PNS guru. Beliau minta dan ini juga sama semangatnya seperti Komisi X bahwa sedari awal kita maunya PPPK ini hanyalah kebijakan jangka pendek. Jangka panjangnya tetap, guru harus diangkat sebagai

PNS," tandas Huda.

Anggota Fraksi PKB DPR itu, menyatakan, butuh kebijakan holistik. Pemerintah pusat hanya memberikan dana untuk gaji saja, sedangkan tunjangan harus dari pemerintah daerah. Sementara banyak pemerintah daerah yang tidak memiliki cukup anggaran dalam APBD-nya.

"Itu yang lalu menjadi dilematis bagi Pemda. Maunya Pemda, tunjangan maupun gajinya menjadi beban APBN. Sekarang ini, kan, dibelah. Gajinya dari APBN dan tunjangan dari APBD. Ini membuat Pemda harus menghitung terus menerus kemampuan fiskal daerahnya. Dan itu tidaklah gampang," ujarnya.

Di Kabupaten Serang, Banten, Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin menyorot soal budaya literasi. Rendahnya literasi selama ini karena persediaan buku terbatas dan petugas pustakawannya sangat minim. Bahkan, ada satu sekolah sampai tidak memiliki tenaga pustakawan.

"Dengan demikian sejumlah persoalan tersebut harus ada jalan keluar seperti ahli pustakawan perlu diperhatikan statusnya kepegawaiannya. Bisa dilakukan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun pegawai



FOTO: RINI/NR

Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin saat bertukar cenderamata usai memimpin pertemuan.

khusus," ujar Djohar saat memimpin kunker Komisi X dengan Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, dan pejabat terkait lainnya di Balai Pertemuan Kantor Bupati Kabupaten Serang, Jumat (14/4/2023) silam.

Di sisi lain, rendahnya literasi disebabkan kurangnya minat baca murid-murid di sekolah. Hal itu lantaran tugas-tugas sekolah lebih memberikan penekanan pada tugas berhitung dibandingkan tugas membaca. Sehingga, hal ini mengakibatkan budaya literasi atau pun kegemaran membaca menjadi rendah.

"Perlu perubahan, bagaimana

meningkatkan budaya literasi di seluruh daerah, dan di seluruh Indonesia dapat meningkat. Faktor-faktornya perlu peran semua pihak-pihak terkait bagaimana mendorong siswa untuk mau membaca, sehingga lama-lama gemar membaca," jelas politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Sedangkan di Boyolali, Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti menyampaikan bahwa kehadiran negara di perguruan tinggi swasta masih sangat kecil. Hal itu sama dengan kehadiran pemerintah di SD, SMP, SMA, SMK swasta.

"Padahal, yang harus kita lihat adalah siswanya. Siswanya ini mau sekolah negeri mau sekolah swasta itu haknya sama terhadap APBN. Nah, ini yang mungkin perlu dikaji kembali. Saya enggak tahu karena tren keputusannya itu hanya mengurus gedung-gedung milik negeri, dan guru-guru sekolah negeri," ujar Agustina saat kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Kabupaten Boyolali, Jumat (14/4/2023).

"Mereka lupa anak-anak di sekolah swasta itu juga punya hak yang sama dan jumlah swasta lebih banyak, ingat loh ya. Undang Undang Dasar 1945, negara wajib membiayai terutama yang pendidikan dasar," serunya. — dep, rni, skr/mh



FOTO: SINGGIH/NR

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti saat bertukar cinderamata usai pertemuan.

# Pertumbuhan Ekonomi Bali Diapresiasi

Komisi XI DPR RI mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Bali yang terus menunjukkan tren positif. Ekonomi Bali tumbuh 6,61 persen (yoy), hanya lebih rendah dibandingkan Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan NTB yang masing-masing tumbuh sebesar 18,96 persen (yoy), 17,75 persen (yoy), dan 7,04 persen (yoy).



FOTO: ICHAH/NR

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari saat memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI di Kabupaten Tabanan.

**W**akil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari memaparkan hal ini di

Tabanan, Bali, Jumat (14/4/2023) lalu. Pertumbuhan ekonomi Bali tersebut dilatari penyelenggaraan KTT G20 pada Oktober dan November tahun lalu. Keterlibatan delegasi maupun non- delegasi dalam jumlah besar mendorong naiknya permintaan terhadap ketersediaan sarana akomodasi dan makan-minum, transportasi, serta destinasi perdagangan besar dan eceran.

Sejumlah maskapai penerbangan internasional juga membuka rute penerbangan baru secara direct flight ke Bali. Ini memberikan dampak positif terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang

triwulan IV 2022. Politisi Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan pada tahun 2022 sebesar 2,94 persen.

Selain itu, Hatari juga menyoroti bahwa selama lima tahun terakhir, dari 2018 hingga 2022, struktur perekonomian Kabupaten Tabanan didominasi oleh empat kategori lapangan usaha. "Yang pertama, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 22,90 persen. Kedua, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 17,11 persen. Ketiga, konstruksi sebesar 10,20 persen. Dan keempat, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 9,01 persen," urai Hatari.

Sementara di Nusa Dua, Bali, delegasi Komisi XI DPR RI melihat

sisi lain Bali usai pandemic Covid-19. Pandemi Covid-19 yang lalu, telah memberi dampak besar pada lemahnya perekonomian Bali. Pemerintah pun telah melakukan berbagai stimulus untuk melakukan pemulihan perekonomian, termasuk melalui kinerja fiskal hingga melibatkan lembaga keuangan.

"Pemerintah mempunyai program-program tentang pemulihan ekonomi. Salah satu program itu akan diberikan melalui penguatan sektor jasa keuangan. Kita ingin lihat bagaimana implementasi program pemerintah, dari Program Bank Indonesia, OJK, kemudian LPS terkait pemulihan ekonomi di Bali. Nah, kalau kita lihat tren dari sisi pertumbuhan sudah mulai pulih, tapi dari sisi sektor jasa keuangan, kita lihat dari laporan OJK dan perbankan di sini mereka



FOTO: UCHA/NR

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP saat bertukar cenderamata usai pertemuan rapat Tim Kunres Komisi XI DPR RI.

pelaku usaha ini masih membutuhkan restrukturisasi dan relaksasi kredit," ujar Dolfie OFP usai rapat, di Nusa Dua, Bali, Jumat (14/4/2023) lalu.

Terkait dengan restrukturisasi kredit, Dolfie menjelaskan bahwa OJK telah memutuskan untuk memperpanjang restrukturisasi dan relaksasi kredit di seluruh Indonesia hingga 2024 dari yang seharusnya berakhir pada 2023 ini. Menanggapi hal tersebut, Politisi PDI Perjuangan ini meminta OJK membuat rancangan mitigasi risiko, apabila afirmasi tersebut benar-benar dihentikan.

Meski masih membutuhkan relaksasi dan restrukturisasi, sektor jasa keuangan yang ada di Bali masih berada dalam kendali manajemen mitigasi risiko. Hal tersebut disampaikan berdasarkan laporan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati serta *stakeholder* sektor jasa keuangan yang hadir dalam kesempatan tersebut.

"Kalau di Bali sendiri, dari laporan yang disampaikan Pak Wagub, dari sektor jasa keuangan semua dalam kendali manajemen mitigasi risiko.

Artinya, risikonya terkendali, semua dalam keadaan pemulihan. Kemudian wisatawan juga bertambah mulai banyak yang masuk dan sebagainya. Dalam perkembangannya, perlu poles-olesan program pemerintah daerah untuk memperkuat wisata di Bali," tuturnya.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga mendapatkan perhatian dalam rapat ini. Tak hanya besarnya, namun juga penjaminannya. Legislator dapil Jawa Tengah itu kemudian meminta pemerintah menyusun strategi, mengingat kebutuhan penjaminan yang ikut meningkat seiring dengan peningkatan penyaluran KUR biasanya diselesaikan dengan penambahan modal pada lembaga penjamin.

Masih di Bali, tim kunker Komisi X DPR menyorot soal penyalahgunaan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. Kasus ini terjadi beberapa waktu lalu, ketika seseorang menempel QRIS di kotak amal masjid.

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendesak Bank Indonesia (BI) melakukan evaluasi implementasi penerbitan, penggunaan, dan pengawasan QRIS di lapangan. "Saya kira kejadian ini patut didalami lebih lanjut dan menjadi bahan evaluasi BI secara menyeluruh terhadap penerbitan hingga penggunaan QRIS. Karena ternyata inovasi pembayaran digital ini masih punya celah untuk diselewengkan," ungkap Puteri Kamis, (13/4/2023) lalu.

Oleh karena itu, politisi daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII itu mendorong BI mengintensifkan pengawasan terhadap penggunaan QRIS di lapangan guna mendeteksi dan mencegah modus penipuan serupa. "Jadi, begitu ditemukan pelanggaran, BI bisa segera menginvestigasi dan menindak tegas supaya tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat," ungkap Puteri.

**nm, ndy, rdn/mh**



FOTO: HANUM/NR

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI.

# Mengantisipasi Cuaca Ekstrem



FOTO: AREF/NR

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama saat pertemuan di NTB.

**Cuaca panas, isu yang belakangan kerap menjadi pembicaraan masyarakat Indonesia. Apakah Indonesia telah mengalami cuaca panas ekstrem seperti sejumlah negara di Asia lainnya. Beberapa Komisi di DPR menyoroti fenomena ini.**

Dalam beberapa pekan terakhir, Jakarta dan sebagian besar wilayah di Indonesia, bahkan di beberapa negara tetangga lainnya merasakan kondisi cuaca yang sangat panas. Dari laporan BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) pada tanggal 25 April 2023 lalu, berdasarkan pengamatan BMKG dari stasiun pemantau di Ciputat, suhu maksimum harian di Indonesia sempat mencapai 37,2°C. Meskipun

secara umum, suhu tertinggi di beberapa lokasi tercatat berada pada kisaran 34°C sampai 36°C hingga saat ini.

Cuaca panas ekstrem di sebagian wilayah Asia ini konon dipengaruhi oleh gelombang panas atau *heatwave*. Namun, tidak demikian dengan yang terjadi di Indonesia. Plt. Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Dodo Gunawan kepada media mengungkapkan bahwa Indonesia tidak mengalami gelombang panas. Cuaca panas di Indonesia lebih

disebabkan dinamika atmosfer yang tidak biasa. Salah satunya, fenomena El Nino, yaitu kondisi ketika suhu permukaan laut di kawasan Pasifik lebih hangat dari biasanya.

Hal itu memengaruhi pergerakan angin dan pola cuaca di Indonesia, sehingga membuat suhu udara yang lebih tinggi dari normal. Selain itu, ada tekanan udara rendah di sekitar wilayah Indonesia juga dapat memicu terjadinya suhu udara yang panas. Cuaca itu tentu berisiko menimbulkan beberapa peristiwa atau bencana,

seperti kebakaran hutan dan lahan, serta dampak lain yang akan menimpa sektor pertanian.

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menilai, sangat diperlukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk petani soal cuaca panas yang berpotensi menimbulkan kekeringan. "BMKG harus mendistribusikan informasi kondisi cuaca terkini, termasuk suhu panas yang terjadi belakangan ini kepada masyarakat, baik melalui media massa, media sosial, dan berbagai literasi yang ada. Bahkan, BMKG harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, Polri, TNI, serta para penyuluh desa dan petani," ujar Suryadi.

Dengan pemberitahuan dini akan lebih mudah menentukan langkah antisipatif. Sehingga, akan meminimalisir terjadinya berbagai kerugian atau peristiwa yang tidak diinginkan. Seperti terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kerap terjadi di berbagai wilayah pada musim kemarau.

"Ya, Karhutla seolah menjadi fenomena yang selalu terjadi di musim kemarau. Dengan cuaca panas yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir ini, tentu potensi



FOTO: ARIEF/NR

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama saat pertemuan di NTB.

terjadinya titik-titik api di wilayah hutan dan lahan semakin besar."

Suryadi melanjutkan, di NTB, dapilnya sendiri, sebenarnya jarang terjadi kebakaran hutan dan lahan. Walau begitu informasi dini tentang kondisi suhu panas yang akan berdampak pada kekeringan dan berisiko terhadap karhutla ini sangat diperlukan untuk menentukan langkah antisipatif terutama di beberapa wilayah yang rentan terjadi titik api.

Diketahui beberapa wilayah di Indonesia terutama yang memiliki jumlah kawasan hutan yang besar, telah menyiapkan langkah antisipasi terjadinya Karhutla. Provinsi Riau misalnya, sudah menetapkan status siaga darurat Karhutla. Pemda setempat bersama TNI/Polri dan *stakeholder* terkait tentu harus selalu siaga terhadap fenomena ini. Mengingat kemungkinan kasus Karhutla diprediksi meningkat tahun ini.

Bahkan, Pemerintah Pusat juga telah "mewanti-wanti" Pemda beserta Forkopimda lain di daerah-daerah yang menjadi langganan Karhutla saat musim kemarau tiba. Politisi Fraksi PKS ini, mendorong pemerintah menyiapkan skenario tertentu jika cuaca panas ini terus berlanjut. Termasuk kemungkinan melakukan modifikasi cuaca untuk mengatasi kekeringan.

"Kerja sama semua *stakeholder* sangat diperlukan. Apabila cuaca ekstrem menyebabkan kekeringan ini terus berlanjut, maka pemerintah harus bekerja cepat mengatasinya, termasuk skenario terburuk dengan melakukan modifikasi cuaca," pungkasnya. — ayu/mh



FOTO: ARIEF/NR

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama

# Pesan Humanis dari KTT ASEAN ke-42



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat berjalan menuju pembukaan acara ASEAN-AIPA Leaders Interface Meeting di Labuan Bajo.

FOTO: IST/NR

Pertengahan Mei lalu, KTT ASEAN berakhir. Semua delegasi dari sebelas negara ASEAN hadir. Presiden Joko Widodo sebagai Ketua ASEAN membuka konferensi ini. Dan Ketua DPR RI Puan Maharani juga hadir memimpin pertemuan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang dihelat di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

"Tidak hanya para pemimpin eksekutif, para pemimpin parlemen ASEAN juga hadir menyurakan berbagai isu sekaligus menyamakan persepsi dan komitmen bersama untuk stabilitas kawasan. Puan menyerukan semua delegasi menjaga perdamaian untuk kepentingan kawasan.

"Sebagai parlemen, dalam perspektif kami, kita bersama-sama menjaga perdamaian, kesatuan, sentralitas, dan vitalitas ASEAN sebagai faktor yang menjamin perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasan," ucap Puan dalam AIPA-ASEAN Leaders' Interface

Meeting di Labuan Bajo, NTT, Selasa (10/10/2023) lalu.

Puan menjelaskan bahwa tema yang diangkat dalam AIPA adalah *Responsive Parliaments For A Stable and Prosperous ASEAN* atau Parlemen yang Responsif untuk ASEAN yang Stabil dan Sejahtera. Hal itu sejalan dengan tema KTT ASEAN 2023 ini, yakni *ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*.

AIPA sendiri melahirkan lima rekomendasi penting. Pertama, negara-negara Asia Tenggara melindungi perdamaian, kesatuan, sentralitas, dan vitalitas ASEAN. Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat serta berkelanjutan guna meningkatkan ketahanan ASEAN dengan fokus pada ketahanan energi dan pangan.

Selanjutnya, ketiga adalah negara-negara Asia Tenggara perlu konsisten mempromosikan ekonomi melalui investasi hijau sekaligus mendorong keseimbangan berkelanjutan sesuai dengan kesepakatan dan kebijakan hukum di ASEAN. Keempat, meningkatkan

Pesan perdamaian selalu menggaung pada perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN. Kampanye lingkungan juga selalu mengemuka, menyertai isu-isu politik kawasan. Ekonomi hijau dan kemakmuran penduduk adalah dua isu humanis yang selalu muncul.

efisiensi operasional mekanisme ASEAN dan mitra, termasuk AIPA.

Terakhir, ASEAN perlu mendorong inovasi, transfer, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Puan selanjutnya berharap, para pemimpin parlemen



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat pembukaan acara ASEAN-AIPA Leaders Interface Meeting di Labuan Bajo.

FOTO: IST/NR



Ketua DPR RI Puan Maharani saat foto bersama dengan pimpinan-pimpinan parlemen negara Asia Tenggara yang hadir di KTT ASEAN ke-42.

ASEAN memahami pandangan dan gagasan mengenai isu-isu yang berdampak pada kawasan dari sudut pandang parlemen.

Menjadi Presiden AIPA 2023, Puan menginginkan proses pembangunan ASEAN *Community* mengambil tanggung jawab penuh serta menjadikan sentralitas dan netralitas ASEAN sebagai satu-satunya prinsip panduan untuk mempromosikan keharmonisan regional. Kemudian negara-negara Asia Tenggara juga dapat hidup berdampingan secara damai demi kemakmuran bersama.

"Dalam mencapai tiga pilar responsif, stabil, dan sejahtera, kami Parlemen Anggota AIPA, harus membangun sinergi dan bekerja bahu-membahu dengan pemerintah kita masing-masing," ucap Puan.

Tak ketinggalan, isu kemanusiaan di Myanmar juga disinggung Puan. Ia mengatakan, ASEAN harus mempertahankan mekanisme yang terbuka dan inklusif untuk pembangunan perdamaian dan pencegahan konflik, serta memastikan ASEAN tetap menjadi kekuatan yang andal dan kuat untuk mengatasi tantangan perdamaian dan keamanan kawasan. "Kami Parlemen Anggota AIPA berkomitmen bekerja sama dengan cabang eksekutif ASEAN untuk memulihkan perdamaian dan demokrasi di Myanmar," tegas Puan

### Promosi Labuan Bajo

KTT ASEAN dan AIPA ini, jadi momentum memperkenalkan Labuan Bajo kepada para pemimpin parlemen ASEAN. Ketua DPR RI Puan Maharani aktif memperkenalkan Labuan Bajo dengan segala perspektifnya. Puan pun mengajak para delegasi AIPA berlayar dengan kapal Phinisi.

Dengan Phinisi, semua delegasi berkeliling kawasan Labuan Bajo dari Dermaga Ayana. Dua jam berkeliling tentu memberi kesan sendiri. Menyaksikan keindahan alam Labuan Bajo yang menakjubkan. Kebetulan saat itu, matahari segera tenggileam. Ini membuat lanskap Labuan Bajo kian menampakkan pesona

cantiknya.

Hamparan pulau tersaji indah sejauh mata memandang. Ada Pulau Bidadari, Pulau Kalong, Pulau Taka Makassar, Pulau Manta Point, Pulau Kanawa, Pulau Padar, Pulau Rinca, serta Pulau Komodo. Di pulau terakhir itu, hidup satwa endemik dan purba, komodo. Di Pulau Kalong, delegasi sempat singgah, melihat kelelawar berterbangan di waktu senja.

Keindahan alam seperti itulah yang sengaja disajikan Puan sebagai upaya mengenalkan destinasi wisata Indonesia kepada peserta KTT ASEAN ke-42, khususnya para pemimpin parlemen Asia Tenggara.

"Pesona Labuan Bajo seperti yang kita nikmati saat ini terletak pada keindahan laut dan pemandangan alamnya, termasuk Taman Nasional Komodo. Atraksi ini membuat Labuan Bajo sebagai kota nelayan kecil dan menjadikannya sebagai tujuan wisata super prioritas Indonesia," tutur Puan saat berlayar bersama delegasi AIPA.

Tak hanya berlayar mengelilingi kawasan Labuan Bajo, Puan juga mengajak delegasi parlemen Asia Tenggara menikmati makan malam di atas geladak kapal Phinisi. Sambil berlayar, delegasi AIPA merasakan syahdunya makan malam sambil berlayar di kawasan wisata super prioritas Indonesia tersebut. 



FOTO: BONIS/NR

Ketua DPR RI Puan Maharani saat menjamu para pimpinan parlemen negara ASEAN di atas kapal Phinisi Lako Sae.



**DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)**



## Mercy Chriesty Barends

# Resmikan Pembukaan Diklat Deteksi Kebocoran Gas

Anggota Komisi VII DPR RI, Mercy Chriesty Barends menggunakan masa resesnya untuk bertemu dan menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Meskipun di luar itu, Ia pun selalu mengunjungi masyarakat Maluku yang notabene menjadi konstituennya.

**D**i masa Reses kali ini, politisi Fraksi PDI Perjuangan ini bertemu dengan masyarakat umum dan mahasiswa Kota Ambon dalam kegiatan Sertifikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Pelatihan *Internet of Things (IoT)* dan Pelatihan Pengelolaan Sampah Plastik, yang digelar di Santika Hotel Ambon, Rabu, 17 Mei 2023 lalu.

"Tujuan digelarnya tiga pendidikan dan pelatihan (diklat) tersebut di Kota Ambon diharapkan dapat memberikan dampak besar bagi kemajuan dan kesejahteraan Maluku di waktu-waktu yang akan datang," ujar Mercy usai membuka secara resmi kegiatan yang digelar bersama Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas ini.

Dijelaskan Mercy, pelatihan deteksi dini kebocoran gas rumah tangga ini, melatih masyarakat



FOTO: IST/ANR

Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Chriesty Barends saat kegiatan serap aspirasi bertemu dengan mahasiswa.

untuk memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga, masyarakat tidak khawatir kebocoran gas. Pasalnya, dengan menggunakan teknologi dengan cepat dan efektif dapat membantu proses migrasi dari minyak tanah ke gas.

"Dengan IoT deteksi kebocoran gas, maka otomatis dalam dua detik aja langsung ketahuan bahwa ada gas bocor entah dari tabungnya, entah dari pemasangan regulator dengan selangnya, itu bisa langsung ketahuan, termasuk deteksi api," paparnya.

Ditambahkannya, Diklat yang diikuti 350 peserta, yang terdiri dari

100 mahasiswa Kampus Politeknik Negeri Ambon dan 250 masyarakat umum se-Kota Ambon ini langsung didatangkan dari Cepu ke Kota Ambon. Sebab, jika mereka harus ikut ke Cepu untuk bisa mendapatkan sertifikasi berstandar tinggi, harus membayar sekitar Rp25 juta per orang.

"Bayangkan Direktur PEM Akamigas (Dr. Erdila Indriani, M.T) langsung datang ke sini. Kita datangkan tenaga pengajar dosen dan sebagainya yang jumlahnya 12 orang, tujuannya untuk mempersiapkan masyarakat atau mahasiswa terutama PEM di Kota Ambon," jelasnya. — ayu/mh

## AA Bagus Adhi Mahendra Putra Membangun Penangkaran Penyu

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar AA Bagus Adhi Mahendra Putra merupakan politisi yang punya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Hal ini tercermin dari aktivitasnya di daerah pemilihannya di Bali. Gus Adhi begitu dia akrab disapa, sangat mendukung program pelestarian penyu di wilayah pantai Biaung Kesiman Kertalangu.



FOTO: IST/NR

Anggota DPR RI AA Bagus Adhi Mahendra Putra saat menangkap sejumlah penyu di wilayah pantai Biaung Kesiman Kertalangu.

**D**ia pun memberikan dukungan mulai dari pembangunan tempat penangkaran dan penetasan telur penyu.

Kegiatan ini dia lakukan bersama dengan kelompok nelayan Sari Segara Kertalangu dan Pokmaswas dengan ketua Mahayana Bali. Ini merupakan salah satu wujud kepedulian Gus Adhi terhadap pelestarian habitat di laut terutama penyu. "Mari kita cintai lingkungan dan satwa yang ada," ujar Gus Adhi.

Dia menjelaskan, penyu lekang, disebut juga *olive ridley sea turtle* dalam bahasa Inggris, merupakan spesies penyu yang hidup di perairan tropis dan subtropis yang berperairan dangkal. Penyu lekang ditemukan bertelur di Samudra Hindia, Samudra

Pasifik, dan pantai di pulau-pulau besar.

Penyu Lekang termasuk hewan omnivora. Makanannya adalah kepiting, udang, lobster, lamun, alga, siput, ikan, dan ubur-ubur. Penyu lekang umumnya bertelur saat menjelang malam (jam 20.00-24.00). Sedangkan penyu sisik waktu bertelur tidak dapat diduga, kadang malam

hari, kadang siang hari.

Semua jenis penyu yang ada di Indonesia dilindungi UU No.5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penyu ini juga masuk dalam daftar satwa dilindungi menurut PP. Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.  ssb/  
mh



## Rahmat Muhajirin

# Gelar Musabaqoh Hifdzul Quran

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Rahmat Muhajirin (RM) memberikan hadiah umroh bagi 16 penghafal Al Quran dan 2 ustaz dan ustazah melalui kegiatan Musabaqoh Hifdzul Quran yang diadakan Yayasan Baitun Ar-Rahman Ar-Rahim, di Sidoarjo, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

**D**alam acara tersebut pria yang akrab disapa RM ini menyampaikan bahwa Musabaqoh Hifdzul Quran berhadiah umroh ini merupakan gagasan istrinya Mimik Idayana. Kegiatan berhadiah umroh ini, jelas RM, sudah berjalan empat kali, kemudian sempat terhenti karena krisis Covid-19.

"Jika tahun 2018 lalu kita

menyeleksi 15 peserta terbaik untuk diberangkatkan umrah, maka tahun ini kami menambah kuota menjadi 20 hafiz, yang berangkat dari sekitar 80 orang peserta," tutur RM.

RM yang juga merupakan Dewan Pembina Yayasan Baitun Ar-Rahman Ar-Rahim ini berpesan agar para Hafiz dan hafizah yang menjadi pemenang dan mendapat kesempatan ke Tanah Suci untuk bisa mengkhataamkan

Al Quran di Tanah Suci dimana kitabullah ini dilahirkan.

"Ananda merupakan orang-orang pilihan Allah, karena dalam diri kalian ada kalamullah, dalam usia yang masih dini ananda sudah mampu menghafal Al Quran 30 juz. Saya berharap sebisa mungkin nanti di Tanah Suci agar membaca dan mengkhataamkan Al Quran sebanyak mungkin di tempat Al-Qur'an ini diturunkan," kata legislator Dapil Jawa Timur I ini.

Politisi Gerindra ini memberangkatkan anak penghafal Al Quran ke Tanah Suci yang terdiri dari 3 anak SD, 1 siswa SMP, 3 siswi SMP, 3 siswa SMA, 3 santriwati dari tingkat SMA, serta 2 orang dewan juri yang didampingi ustaz dan ustazah dari Yayasan Baitun Ar-Rahman Ar-Rahim

. — tn/mh



FOTO: IST/INR

Anggota DPR RI Rahmat Muhajirin saat mengikuti kegiatan Musabaqoh Hifdzul Quran.

Sri Wulan

# Penyuluh Agama Harus Dibekali Kemampuan Komunikasi

Anggota DPR RI Sri Wulan menjadi pembicara dalam kegiatan Optimalisasi Peran penyuluh Agama Islam dalam Pembangunan Nasional Wilayah III Provinsi Jawa Tengah pada Sabtu (13/5) silam. Di hadapan para peserta kegiatan, legislator dapil Jawa Tengah III ini menyampaikan agar penyuluh agama dapat didukung dengan berbagai kemampuan komunikasi.

“**A**gar seorang penyuluh agama benar-benar memiliki kompetensi di bidang komunikasi, maka perlu diberikan berbagai pengetahuan komunikasi, seperti psikologi komunikasi, semiotika komunikasi, komunikasi antarbudaya, komunikasi interpersonal, komunikasi massa, retorika, dan public speaking,” ujarnya.

Menurut Wulan, penyuluh agama memiliki peran penting

dalam masyarakat. Ia berkata bahwa peran penyuluh Agama Islam sangat berperan dalam pelayanan kepada masyarakat. Kinerja yang baik akan menghasilkan layanan yang baik, sehingga masyarakat diharapkan puas dengan layanan yang ada di KUA.

Lebih lanjut, Wulan menyinggung pentingnya peranan penyuluh agama Islam dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Sejalan dengan tujuan kegiatan, yaitu meningkatkan peran dan fungsi penyuluh agama

dalam menciptakan kehidupan beragama yang moderat serta mewujudkan kerukunan umat beragama.

“Pentingnya peranan penyuluh Agama Islam dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada saat ini, diantaranya adalah tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan berbagai perbedaan dari sisi etnis, budaya, bahasa, dan agama. Juga tantangan terhadap arus media sosial,” lanjut politisi Partai NasDem itu.

Acara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI ini menghadirkan para penyuluh dari berbagai daerah di Jawa Tengah, salah satunya adalah Kabupaten Pati yang merupakan daerah pemilihan Sri Wulan.

 uc/mh



FOTO: IST/NR

Anggota DPR RI Sri Wulan saat Kegiatan Optimalisasi Peran penyuluh Agama Islam dalam Pembangunan Nasional Wilayah III Provinsi Jawa Tengah.

## Nihayatul Wafiroh

# Bagikan Program TKM untuk Muslimat dan Fatayat

Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nihayatul Wafiroh menilai keterampilan dan kesempatan pekerjaan bagi masyarakat harus terus diperkuat dan diperluas, termasuk bagi anggota dan kader Muslimat NU juga Fatayat NU di kabupaten Banyuwangi. Menurutnya, hal tersebut perlu didukung dengan program padat karya.



FOTO: IST/ANR

Anggota DPR RI Nihayatul Wafiroh saat mengikuti sosialisasi program Perluasan Kesempatan Kerja sektor padat karya.

**S**aya mendorong keterampilan dan juga peluang kesempatan kerja bagi anggota Muslimat serta Fatayat NU harus diperkuat, terutama bagi mereka yang ada di kabupaten Banyuwangi," kata perempuan yang akrab disapa Nduk Nik tersebut, dalam acara sosialisasi program Perluasan Kesempatan Kerja sektor padat karya di Banyuwangi, bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Sabtu (20/5) lalu.

Untuk semakin memperkuat keterampilan dan membuka kesempatan pekerjaan tersebut,

Ninik membagikan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang bernilai 20 juta kepada Muslimat NU dan Fatayat NU se-Banyuwangi. "Ini tanpa pungutan sepeserpun ya Ibu-ibu, tapi tetap harus proses administrasi pendaftaran dan pelaporan. Kalau ini (pendaftaran dan pelaporan) tidak dilakukan kasihan Ibu Menteri," ujar Nduk Nik.

Dalam kesempatan itu, legislator Dapil Jawa Timur III ini membagikan program TKM kepada 25 Pengurus Anak Cabang (PAC) dan 1 Pengurus Cabang (PC) Muslimat NU. Serta kepada 18 PAC Fatayat NU di Banyuwangi. Tak hanya itu, Nduk Nik juga menyerahkan bantuan

operasional untuk setiap PAC dan PC Muslimat NU dan Fatayat NU. Hal itu ia lakukan sebagai apresiasi atas dedikasi dua organisasi sayap NU dalam meneguhkan Islam wasathiyah di tengah masyarakat.

"Satu lagi, sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih saya kepada Ibu-ibu Muslimat, pada kesempatan kali ini, saya pribadi akan memberikan dana operasional kepada PC Muslimat dan seluruh PAC Muslimat se Kabupaten Banyuwangi. Ini tanpa proposal ya ibu-ibu, juga tanpa LPJ. Silakan digunakan untuk kepentingan organisasi," tukasnya.

— **bia/mh**

## Teuku Riefky Harsya Silaturahmi dengan Pj Wali Kota Banda Aceh



FOTO: IST/ANR

Anggota DPR RI Teuku Riefky Harsya saat kunjungan Dapil silaturahmi dengan Pj Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh I, Teuku Riefky Harsya bersilaturahmi dengan Pj Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq, beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, pria yang akrab disapa TRH itu mendorong agar program pembenahan kota Banda Aceh dapat terimplementasikan dengan baik.

“**K**ita terus mendorong agar program pembenahan kota Banda Aceh dapat diimplementasikan dengan baik selama kepemimpinan Pj Wali Kota ini,” ucap politisi Fraksi Partai

Demokrat ini.

TRH juga mengatakan ia siap mendukung upaya Pj Wali Kota dalam mewujudkan kota Banda Aceh yang lebih baik. “Kita siap mendukung ikhtiar Pj Wali Kota untuk mewujudkan Banda Aceh yang lebih baik, serta mampu menghadirkan

kesejahteraan bagi masyarakatnya,” tutup Pimpinan Komisi 1 DPR-RI ini.

Dalam acara silaturahmi tersebut, TRH didampingi oleh Anggota DPR RI dari Dapil Aceh II Muslim, Ketua Fraksi Demokrat DPRA Nurdiansyah Alasta, dan Wakil Ketua DPRK Banda Aceh Isnaini Husda.  rdn/mh

## Rofik Hananto

# Ajak Anak Muda Nobar 'Buya Hamka'



FOTO: IST/NE

Anggota DPR RI Ahmad Syaikhul saat memimpin ratusan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjalani ziarah Wali Songo.

**Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Rofik Hananto mengajak seratus anak muda Purbalingga menonton film yang berjudul Buya Hamka di Bioskop NSC Purbalingga, Sabtu (20/5/2023) lalu.**

**M**enurutnya, rasa nasionalisme dan berkebangsaan sangat penting untuk ditanamkan pada diri anak muda zaman sekarang. Lantaran saat ini derasnya arus informasi dan keterbukaan publik, berdampak pada tak terbendungnya budaya dan kehidupan dari berbagai negara di belahan dunia.

"Kenapa saya ajak generasi

muda untuk menonton bersama film ini? Pada film ini terkandung wujud nasionalisme, persatuan, dan juga ketuhanan. Maka saya ajak generasi muda, untuk menonton bersama film ini," ujarnya.

Lebih lanjut legislator dapil Jawa Tengah VII menyampaikan, pada tahun 2045 Indonesia diprediksi akan menghadapi bonus demografi. Nasib bangsa ada di tangan generasi muda. Maka untuk menjadi bangsa

yang kuat, para generasi muda perlu memahami empat pilar kebangsaan agar produktif serta kokoh tertanam nilai kebangsaan, nilai persatuan, dan memegang erat ideologi bangsa.

Empat pilar kebangsaan adalah Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika. Empat pilar ini, dirumuskan dan digali dari nilai kehidupan masyarakat Indonesia, kepribadian bangsa, dan ideologi. "Harapannya dengan ini, generasi muda di Indonesia khususnya Purbalingga menjunjung tinggi kepribadian bangsa," tegasnya. 🇮🇩

gal//mh

Nazarudin Dek Gam

# Kunjungi Kampus STIT HAFAS

Anggota DPR RI Nazarudin Dek Gam menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat Aceh. Pada awal Maret lalu, Dek Gam mengunjungi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri Subulussalam (STIT HAFAS). Ia ingin melihat dari dekat kegiatan pendidikan di kampus tersebut berjalan baik.



FOTO: IST/NR

Anggota DPR RI Nazarudin Dek Gam saat memantau kegiatan perkuliahan di STIT HAFAS

D ikutip dari Kabar Hafas, Dek Gam memantau fasilitas pembelajaran dan gedung perkuliahan. Ia disambut Ketua STIT HAFAS Subulussalam Aceh, Syafnial, jajaran struktural kampus, serta para dosen. Ia memasuki ruang-ruang perkuliahan dan perkantoran kampus tersebut.

"Saya sangat prihatin atas gedung

dan fasilitas di kampus ini. Kalau kondisinya begini, saya lihat kurang layak," ungkap Wakil Ketua Majelis Kehormatan DPR RI ini. Ia langsung meminta proposal pengajuan pembangunan gedung kampus tersebut untuk dikomunikasikan langsung dengan kementerian terkait di Jakarta.

Legislator dapil Aceh I itu, juga mendukung usulan penambahan

jurusan baru di kampus itu. Harapannya, kampus STIT HAFAS memiliki beragam jurusan yang diminati para mahasiswa. "Kita akan perjuangkan ini ya, agar kampus kita ini bisa mempunyai jurusan yang banyak, gedung yang layak pakai, dan dokumen-dokumen pendukungnya akan saya bawa ke Jakarta," ujar pemilik Club Persiraja Aceh ini.

Sementara Ketua STIT HAFAS Subulussalam Aceh berharap, kunjungan Anggota DPR RI Dapil Aceh I ini bisa membawa berkah dan manfaat bagi kelanjutan perguruan tinggi yang dipimpinnya. Selain itu, Syafnial juga menyampaikan kepada Anggota Komisi III DPR RI tersebut, agar memfasilitasi akses dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Agama untuk membantu pembangunan gedung dan penambahan jurusan. **mh**

“

**Kita akan perjuangkan ini ya, agar kampus kita ini bisa mempunyai jurusan yang banyak, gedung yang layak pakai, dan dokumen-dokumen pendukungnya akan saya bawa ke Jakarta**

# Elly Rachmat Yasin Menedukasi Para Pelaku UMKM



FOTO: IST/NR

Anggota DPR RI Muhammad Iqbal saat menyalurkan bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian PUPR.

**Anggota DPR RI Elly Rachmat Yasin telah menggelar sosialisasi undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) di Aula Anazah, Kampung Wangun Jaya, Desa Ciaruteun Ilir, Rabu, 17 Mei 2023 lalu.**

**S**ebagai wakil rakyat yang harus membawa aspirasi dan amanah, ia menedukasi ratusan pelaku UMKM dari 15 desa se-Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.

Elly yang juga anggota Fraksi PPP, daerah pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) mengatakan, sosialisasi UUPK penting bagi para pelaku UMKM maupun masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya wilayah

Cibungbulang tentang perlindungan konsumen.

"Harus ada perubahan untuk mengetahui perlindungan konsumen. Jika itu dipahami, maka kenyamanan masyarakat dapat menghindari kerugian. Saya berharap, dengan keberadaan UU No.8/1999 ini, dapat dipelajari atau diketahui oleh masyarakat Kabupaten Bogor," katanya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Camat Cibungbulang Agung

Surachman Ali. Dia mengungkapkan, sosialisasi UUPK ini kerja sama Kementerian Perdagangan dengan Komisi VI DPR RI, yang diselenggarakan di wilayah tugasnya. Ini sangat penting dan patut digencarkan dengan berkelanjutan, agar dapat dipahami oleh pelaku usaha dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

— rnm/mh

# Hanna Pumeera

## Sang Pencerita Lintas Medium

Dikenal sebagai pendongeng sekaligus penulis cilik, bahkan ada juga yang melabelinya sebagai “penggiat literasi”. Hanna tak mau terkungkung dengan label apapun. Menurutnya ia adalah seorang pencerita yang menceritakan apa saja lewat medium.

**G**adis kecil itu mengintip dari balik pagar, tak lama wajah riangnya pun terlihat jelas. Ia dan sang ibu menyambut kedatangan *Parlementaria* di kediamannya yang juga menjadi lokasi ‘Lampu Baca’ berada, sebuah Taman Baca Masyarakat yang digagasnya tahun lalu. Tubuhnya memang kecil namun mimpinya

sangat besar, memang terkesan seperti sebuah kiasan yang klise, namun begitulah adanya.

Di usianya yang masih 11 tahun sudah sederet prestasi yang ia torehkan. Tentunya tak boleh melupakan 6 buku yang ditulisnya beserta ‘Lampu Baca’ dan beberapa gerakan yang digagasnya. Bercerita dalam level yang berbeda, sama seperti anak-anak seusianya, Hanna suka sekali bercerita, namun ia membawa ceritanya ke level yang berbeda. Predikat sebagai seorang pendongeng cilik sering disematkan kepadanya.

Hanna gemar berbagi cerita dari atas panggung, entah sendiri maupun ditemani boneka kesayangannya. Dongeng dan fabel dengan nilai moral menjadi kegemarannya. Uniknya, Hanna tak hanya menyampaikan cerita yang telah lebih dahulu populer. Gadis kecil ini, memilih membawakan cerita yang dibuatnya sendiri. Cerita asli yang dirancang memiliki pesan

sesuai dengan calon penontonnya.

“Terakhir itu dia bikin ‘pesawat kertas’ pas mendongeng untuk anak kanker kemarin. Menyemangati bahwa mereka tetap bisa, kok, mengejar cita-cita. Jadi, biasanya dia buat sendiri terus aku yang ngetik. Dia kan males ngetik hahaha,” ujar Arilya Irfan, ibu dari Hanna yang mendampingi selama wawancara. Medium lain yang sering Hanna gunakan untuk berbagi cerita adalah buku.

Hanna mencetak buku pertamanya di usia 7 tahun. Tak hanya cerita, bahkan ia juga membuat ilustrasi dari buku berjudul “Aku Cinta Indonesia” itu. Buku yang diterbitkan secara Print on Demand oleh penerbit Bukune ini, memberikan gambaran kekayaan permainan tradisional Indonesia dari sisi seorang anak masa kini.

“Aku menceritakan teman-teman aku, tuh, suka bermain gadget. Aku mengajak mereka suka baca buku dan main mainan tradisional kayak petak gunung, engklek, dan



lain-lain. Awalnya, mereka menolak tapi akhirnya setelah aku kasih tau gimana cara mainnya mereka jadi suka deh," ceritanya.

Di usianya yang kesebelas, Hanna telah menghasilkan 6 buku yang terdiri dari 4 buku cerita bergambar dan dua buah buku antologi yang digarap bersama dengan para penulis cilik lainnya. Kabarnya, ia kini sedang menyiapkan buku cerita panjang pertamanya yang akan dibawa ke Penerbit Mizan untuk bergabung dalam seri "Kecil Kecil Punya Karya". Selain itu, iapun mulai melirik membukukan naskah-naskah dongeng yang ditulisnya.

Berbagi cerita melalui 'Lampu Baca' dan 'Koper Baca' Hanna membangun 'Lampu Baca', di salah satu sudut kediamannya, tepatnya di bekas kandang burung milik ayahnya. Lampu Buku sendiri diresmikan langsung oleh Wali Kota Jakarta Timur pada 11 Juni 2022 silam, satu hari setelah ulang tahunnya yang kesepuluh.

"Aku ingin ngajak teman-teman di lingkungan sini untuk gemar membaca karena waktu itu pernah aku nyapa tapi dia nggak nyapa balik karena lagi asik main sama gadgetnya," ungkap Hanna menceritakan awal keinginannya membangun 'Lampu Baca'. Diperkirakan ada sekitar 300 judul buku yang berada dalam taman bacaan mungil itu, mulai dari buku cerita anak, ensiklopedi, hingga buku resep untuk para ibu yang mengantarkan anaknya ke 'Lampu Baca'.

Koleksi tersebut berasal dari koleksi pribadinya serta sumbangan dari para penggiat literasi yang mendukung gerakannya. Sesuai namanya, Hanna berharap rumah literasi Lampu Baca ini dapat menjadi penerang bagi siapapun yang singgah di sini. Selain itu, ia meyakini bahwa buku adalah lampu yang menyala bila dibaca. Kutipan ini pun terpampang di dalam ruangan yang singgah di sini. Selain itu, ia meyakini bahwa buku adalah lampu yang menyala bila dibaca. Kutipan ini pun terpampang di dalam ruangan yang singgah di sini.

Hanna juga menjadi orang yang berada di balik terciptanya ABC Reading Club, sebuah klub buku khusus untuk anak-anak. Klub buku

ini didirikannya lantaran ia selalu menjadi satu-satunya anak-anak saat bergabung di berbagai klub buku. Saat ini, ABC Reading Club telah beberapa kali menggelar kegiatan di sekitar Jakarta. Dalam sekali acara, Hanna membatasi hanya maksimal 50 anak yang bisa bergabung.

Mereka datang dari berbagai penjuru Jakarta, bahkan tak jarang Hanna pun belum mengenal mereka secara personal. Tak sampai situ, kini Hanna kembali melahirkan satu gerakan baru dan ia menamainya 'Koper Baca'. Gerakan ini resmi diluncurkan pada 17 Mei 2023 bertepatan dengan Hari Buku Dunia. Koper Baca berawal dari celetukan sang kakak yang melihat koper Hanna penuh dengan buku sewaktu pulang liburan.

Ia pun secara gamblang mengungkapkan bahwa lahirnya Koper Baca juga terinspirasi dari Kargo Baca besutan Edi Dimiyati, seniornya sesama penggiat literasi. 'Lampu Baca' berjalan, begitulah gerakan 'Koper Baca' ini ia deskripsikan. Hanna dan sang ibu akan senang mengemas buku-buku mereka dan menyebarkan virus literasi bahkan hingga berbagai penjuru negeri. **uc/mh**



## Setjen DPR RI Raih Predikat Sangat Baik Indeks Kinerja Anggaran



FOTO: KRESNO/NR

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat menerima penghargaan peringkat ke empat terhadap Kementerian/Lembaga Berkinerja Terbaik Kategori Pagu Sedang Tahun Anggaran 2022 dari Kementerian Keuangan.

**Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menerima penghargaan peringkat keempat dari sekian banyak kementerian/lembaga berkinerja terbaik kategori Pagu Sedang Tahun Anggaran 2022 dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setjen DPR RI capai Indeks Kinerja Anggaran sebesar 94,71 dengan predikat Sangat Baik sepanjang tahun 2022.**

**M**enurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar, capaian ini menjadi acuan bagi Setjen DPR RI untuk akselerasi yang lebih baik dalam pelaksanaan anggaran yang berkualitas.

"Pertama kami bersyukur atas nama teman-teman di Sekretariat Jenderal DPR yang sudah bekerja keras di semua sektor untuk mencapai indeks kinerja pelaksanaan

anggaran ini. Sehingga, dari Kementerian Keuangan (Setjen DPR RI) mendapat penghargaan sebagai salah satu kementerian/lembaga yang mendapat penghargaan ini," ujar Indra usai menerima penghargaan di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2023), lalu.

Selain menjadi bukti kerja keras seluruh pegawai di lingkungan Setjen DPR RI, penghargaan ini juga menjadi acuan bagi Setjen DPR RI untuk bekerja lebih baik lagi terutama

untuk akselerasi pelaksanaan anggaran berkualitas sesuai amanah Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk penggunaan anggaran tahun 2023, yakni belanja berkualitas untuk transformasi ekonomi Indonesia.

"Kalau dulu kita sudah melaksanakan capaian itu tentu ke depan pelaksanaan anggaran yang berkualitas itu harus menjadi satu semangat bersama bagi semua unit yang ada di Sekretariat Jenderal," harapnya.

Indra menilai, dengan penghargaan ini, menunjukkan Setjen DPR RI telah berupaya dengan baik mengelola anggaran serta transparan kepada publik, sesuai mekanisme acuan dari Kemenkeu yang didampingi dan diawasi Inspektorat Utama DPR RI.  rmm/mh

# DPR RI-Parlemen Amerika Dukung Peningkatan Regulasi Tata Kelola Lingkungan

Pertengahan Mei lalu, Sekretariat Jenderal DPR RI menerima kunjungan delegasi *House Democracy Partnership (HDP)*, Amerika. Di Komplek Parlemen, HDP mengadakan lokakarya dengan tema '*Technical Assistance Consultancy on Citizen Engagement and Policy Solutions for Effective Environmental Governance*'.

**K**epala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI Inosentius Samsul dalam *opening ceremony* lokakarya tersebut mengungkapkan, lokakarya ini merupakan bentuk kerja sama antara Biro Kerja Sama Antara-Parlemen dan Organisasi Internasional Setjen DPR RI dengan *House Democracy Partnership (HDP) United State House of Representatives*.

"Sekretariat DPR RI sebagai *supporting system* parlemen selalu membuka diri untuk menambah ilmu dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik NGO, IGO, dan parlemen



FOTO: DEP/IR

Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI Inosentius Samsul saat foto bersama usai menerima kunjungan Delegasi House For Democracy Partnership (HDP).

mitra. Ini sangat penting untuk mengembangkan pengetahuan dan kapasitas para ahli dan staf di lingkungan DPR RI," katanya.

Sebelumnya, Kepala Biro Kerja-Sama Antar Parlemen (KSAP) Sekretariat Jenderal DPR RI Endang T.D. Retno Astuti menjelaskan, kunjungan delegasi HDP merupakan bagian dari komitmen Kongres Amerika Serikat (AS) untuk membangun kerja sama yang lebih erat dengan DPR RI.

Parlemen Indonesia dengan Parlemen AS secara garis besar memiliki berbagai kesamaan yang strategis dan politis. Sebagai negara yang sama-sama menganut sistem presidensial, kedua parlemen memiliki jumlah yang cukup besar

dan keberagaman isu yang tinggi.

Endang mengapresiasi kunjungan delegasi HDP ini. Menurut Endang, dengan kunjungan tersebut tak hanya kesetiaan DPR RI yang belajar dari delegasi HDP Kongres AS, namun juga sebaliknya.

"Jadi, ini sangat baik. Saya rasa karena kita bukan hanya belajar dari mereka, tapi juga mereka belajar dari kita. Jadi, kita sebagai parlemen yang disegani di Asia Tenggara menyampaikan bahwa inilah performa kita. Sehingga, mereka juga memahami cara kerja parlemen kita dan dengan saling memahami itu, maka mereka akan lebih memberi dukungan keahlian terutama *supporting system* kedua parlemen," sambungnya. **rmm/mh**



FOTO: DEP/IR



Oleh:  
**dr. Schoollaus Daleru, S.Kom**

**A**nda seolah merasa seperti sedang dipaksa lari maraton, namun dengan kecepatan sprint sepanjang waktu. *Burnout* sendiri bukanlah suatu diagnosis medis. Beberapa pakar mengatakan *burnout* mungkin dipengaruhi oleh kondisi depresi. Beberapa penelitian lain mengaitkan kejadian *burnout* dengan faktor individual seperti ciri kepribadian, kondisi kehidupan keluarga, serta jenis kelamin dan usia.

Dikatakan bahwa perempuan dan individu usia muda lebih rentan mengalami *burnout*. *Burnout* bukanlah sesuatu yang bisa hilang sendiri begitu saja, dan malahan bisa semakin memburuk bila tidak kita sadari dan terus dibiarkan berlangsung, hingga memengaruhi kesehatan fisik dan mental serta menghambat kita dalam melakukan pekerjaan dan fungsi sosial.

Kenali 10 pertanyaan di bawah ini untuk mengetahui apakah kita mengalami *burnout*:

1. Apakah Anda menjadi lebih sinis atau kritis di tempat kerja?
2. Apakah Anda merasa berat

## Mencegah *Burnout* di Tempat Kerja

Pada tahun 2019, *burnout* dinyatakan sebagai fenomena okupasional oleh WHO. *Burnout* adalah kondisi dimana tubuh mengalami kelelahan fisik dan atau emosional, dapat diiringi dengan perasaan hampa, terasing, ragu pada diri sendiri, menunda-nunda pekerjaan, dan merasa tidak berdaya dalam menjalani fungsi dasar sehari-hari.

untuk berangkat ke tempat kerja dan kesulitan dalam memulai pekerjaan?

3. Apakah Anda menjadi mudah tersinggung atau lebih tidak sabar di tempat kerja Anda?
4. Apakah Anda merasa kekurangan energi untuk bisa produktif secara konsisten?
5. Apakah Anda merasa sulit berkonsentrasi?
6. Apakah Anda kurang puas dengan pencapaian Anda?
7. Apakah Anda merasa kecewa dengan pekerjaan Anda?
8. Apakah Anda mengonsumsi makanan, obat-obatan, atau alkohol untuk merasa lebih baik?
9. Apakah pola tidur Anda terganggu?
10. Apakah Anda merasakan sakit kepala, gangguan pencernaan, atau keluhan fisik lain yang tidak jelas penyebabnya?

Jika Anda menjawab iya pada sebagian besar pertanyaan di atas, kemungkinan Anda mengalami *burnout*. Langkah yang paling tepat untuk dilakukan berikutnya adalah temui psikolog atau psikiater untuk mengonsultasikan kondisi yang Anda hadapi. Bisa jadi kondisi ini berkaitan dengan depresi.

Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *burnout*:

1. Manajemen jadwal serta membagi prioritas dan beban kerja



yang kurang baik.

2. Ekspektasi kerja serta otoritas yang tidak jelas antarjabatan dan divisi
3. Beban tanggung jawab yang terlalu banyak atau di luar job desk dan kompetensi.
4. Dinamika tempat kerja yang tidak sehat, seperti perundungan, konflik interpersonal, dan intervensi kolega atau atasan yang terlalu

intrusif terhadap pekerjaan Anda.

5. Pekerjaan yang terlalu monoton atau terlalu kacau yang menyebabkan Anda membutuhkan fokus tinggi yang konstan dalam waktu lama.

6. Kurangnya dukungan sosial yang dapat menyebabkan Anda merasa terisolasi dan mudah stres.

7. Ketidakseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi, seperti waktu bersama keluarga dan teman serta waktu istirahat untuk diri sendiri yang berkurang karena jam kerja terlalu tinggi.



8. *Work From Home* (WFH) seringkali menjadi penyebab *burnout* karena batasan tanggung jawab menjadi tidak jelas dan jam kerja seringkali ekstensif hingga memakan waktu istirahat

Perbedaan stres dengan *burnout* adalah ketika stres kita memang merasa terkuras secara fisik dan mental, namun masih bisa pulih dengan sendirinya. Namun, pada

*burnout*, kita terkuras dan merasa tidak mampu untuk pulih kembali. Stres ibarat baterai ponsel yang bisa di-charge ulang kapan saja. Sementara *burnout* seperti aki mobil yang jika sudah habis tidak bisa di-charge ulang lagi.

Dengan demikian, untuk menjaga agar aki kita tidak sampai habis, kita perlu mengurangi tingkat terkurasnya diri kita, sambil terus berusaha menambah deposit kapasitas fisik dan mental kita, sehingga bisa berfungsi terus dengan optimal.

Kiat-kiat di bawah ini bisa Anda lakukan untuk mencegah terjadinya *burnout*:

1. Pertahankan pola hidup sehat dengan olahraga, diet sehat, dan pola tidur yang baik
2. Miliki hobi dan coba lakukan secara rutin
3. Coba lakukan aktivitas relaksasi seperti yoga, meditas, atau tai chi
4. Agendakan liburan berkala untuk refreshing dan pastikan saat melakukannya Anda benar-benar bebas dari dunia pekerjaan
5. Berikan waktu istirahat rutin bagi diri Anda sendiri saat bekerja dan coba disiplin dengan hal itu
6. Tegas dalam membatasi antara jam kerja dengan waktu pribadi Anda, jangan biasakan bekerja di saat Anda sudah tidak berada di jam kerja
7. Jika memang benar-benar tidak cocok, pindah divisi atau cari pekerjaan baru

Ada kalanya beberapa situasi dan kondisi tidak ideal di tempat kerja yang memang sulit dihindari. Dinamika kehidupan pribadi kita juga tidak selalu akan berada pada kondisi yang ideal. Jika Anda terpaksa menghadapi banyak permasalahan yang akhirnya membuat Anda merasa *burnout*, Anda bisa coba melakukan hal ini:

1. Evaluasi pilihan Anda dan bicarakan dengan atasan mengenai kondisi Anda
2. Carilah *support system* yang bisa diandalkan, misalnya rekan kerja, teman, orang terkasih, atau keluarga,

untuk memberi Anda dukungan dan berkolaborasi dengan Anda untuk mengatasinya

3. Mengalihkan emosi negatif ke kegiatan olahraga atau aktivitas fisik lainnya secara teratur

4. Praktikkan *mindfulness*, yaitu sikap yang berfokus pada apa yang ada di sini, saat ini (here and now). Coba ambil sikap duduk tenang di tempat yang hening, fokus pada aliran nafas Anda, sadari segala sensasi fisik yang Anda rasakan, tanpa mencoba mengintepretasinya, tanpa mencoba menilainya, cukup diterima dan disadari se-apa- adanya.

5. Jangan ragu atau malu untuk berkonsultasi kepada psikolog atau psikiater untuk mendapatkan bantuan penentraman secara profesional.

Serta yang tidak kalah penting, kenali pula tanda kegawat-daruratan pada diri Anda, jika Anda merasa beban mental yang Anda tanggung terlalu berat hingga Anda memiliki pikiran untuk melukai diri atau mengakhiri hidup. Segera sampaikan hal tersebut pada orang terdekat Anda dan segera pergi ke instalasi gawat darurat rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan.

Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik dan keduanya saling memengaruhi satu sama lain. Jagalah keseimbangan kesehatan fisik dan mental Anda, dengan membiasakan pola hidup dan pola kerja yang seimbang. Tidurlah saat waktunya tidur, makan saat waktunya makan, dan bersantai serta bersosialisasilah saat waktunya untuk beristirahat.

Pekerjaan memang tidak akan ada habisnya jika terus dikerjakan. Namun, selalu ingat tujuan awal Anda bekerja keras, yaitu untuk kebahagiaan dan kesehatan diri Anda dan keluarga Anda. Pekerjaan tidak seharusnya mengorbankan kesehatan fisik dan mental Anda serta kualitas hidup keluarga Anda. Hidup sehat dan seimbang, niscaya diri kita terhindar dari kondisi *burnout*. 🐾

# Jelajah Sumatera Barat (2)

## Ziarah Saksi Revolusi dan Kejayaan Tanah Andalas

Posisi saya masih di Kota Bukittinggi dan bersiap mengarah ke Batu Sangkar. Perjalanan ini akan saya maksimalkan untuk menziarahi beberapa tempat bersejarah. Mulai dari lokasi konfrontasi zaman penjajahan, hingga kemegahan masa lampau abad pertengahan Nusantara.

**U**sai menyantap pical di samping Taman Panorama, saya memutuskan memasuki taman wisata itu untuk mengunjungi Lubang Jepang. Sebuah bunker atau tempat

perlindungan yang diciptakan Jepang dengan mengeksploitasi tenaga romusha untuk menahan gempuran serangan sekutu.

### Pertahanan Tempur PD II

Saat masih kanak, saya sering mendapati cerita seram seputar bangunan bawah tanah ini. Namun, sekarang tempat wisata tersebut semakin rapi dan pintar berbenah. Berbekal tiket senilai Rp15 ribu, pengunjung dapat menjelajahi terowongan yang menjorok ke perut bumi itu.

Dibangun tahun 1940-an, sebenarnya bunker ini tidak benar-benar selesai dibangun. Dengan kedalaman hampir 80 meter dari permukaan laut dan panjang terowongan, yang mampu teridentifikasi 1,4 kilometer, lubang ini berfungsi sebagai benteng pertahanan bawah tanah sekaligus penjara.

Berada di bawah bayang-bayang pesawat sekutu, Jepang yang memulai perang dunia kedua di area asia pasifik ini butuh bunker bawah tanah yang kuat. Terlihat dari jalan bawah tanah yang mengarah pada pintu-pintu angin di terowongan yang jadi moda pelarian para tentara samurai itu. Berkat pintu-pintu itu meski kita berada di dalam terowongan sirkulasi udara terasa lancar dan sejuk.



View taman panorama tempat lubang Jepang. FOTO: IST



Lobang Jepang. FOTO: IST



Rumah Bung Hatta. FOTO: IST



Lukisan di rumah Bung Hatta. FOTO: AGUNG

Saat ini pengelola telah menambah display di dalam terowongan sehingga mampu menyajikan sejarah masa lalu, tak lupa penerangan yang menghalau gelar dan seram dalam terowongan. Sedangkan opsi menyewa jasa pemandu untuk menerangkan sejarah lubang ini dapat dipilih, tentunya dengan negosiasi harga sewa sebelumnya.

### Sang Proklamator

Nama tepatnya, Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta, berlokasi tepat di depan jalan raya Kota Bukittinggi. Rumah masa kecil sang proklamator itu bergaya panggung dengan dua tingkat, tergolong modern pada zamannya, mengingat abad 19 dan 20 rumah-rumah Minangkabau ialah rumah gadang beratap 'gonjong' seperti tanduk kerbau.

Di dalam rumah yang disulap menjadi museum itu benda-benda peninggalan keluarga masih tertata rapi. Selain menjadi lebih kenal dengan sosok Bung Hatta serta asal usul keluarga serta sejarahnya berpolitik, di museum ini kita turut mempelajari budaya lokal masyarakat Bukittinggi pada masa kolonial lewat benda-benda yang dipajangkan. Misalnya, lumbung padi kecil yang terletak di belakang rumah sebagai bank pangan keluarga pada masa itu.

Sementara di area halaman belakang rumah terdapat kandang

kuda dengan kereta penariknya atau biasa disebut bendi. Bagi masyarakat abad 20, penghuni rumah yang memiliki kereta kuda pertanda status kelas sosialnya yang tinggi. Keluarga Bung Hatta sendiri diketahui memiliki darah ulama besar dari sang ayah dan saudagar berprestasi dari garis keturunan ibunya.

### Istano Basa Pagaruyung

Perjalanan saya teruskan menuju Kabupaten Batu Sangkar menuju destinasi selanjutnya yang berjarak sekitar 44 km dari Bukittinggi. Dengan mengarah ke timur, kita akan disajikan pemandangan Gunung Marapi, tempat masyarakat Minangkabau beranggapan sebagai lokasi asal-usul nenek moyangnya. Dengan waktu tempuh kurang dari 1,5 jam, saya sampai di Istano Basa Pagaruyung.

Bangunan menyerupai rumah gadang raksasa ini merupakan replika

dari Istana Kerajaan Pagaruyung, sebuah entitas politik yang pernah menguasai dataran tinggi Minangkabau dari abad 14 hingga 17. Berdiri di kaki Gunung Marapi, istana ini menjadi objek wisata utama masyarakat Batusangkar. Selain menjadi taman bermain, bangunan ini juga menjadi museum bagi adat istiadat masyarakat minang dengan berbagai benda yang dipamerkan.

Istana ini menjadi destinasi akhir dalam perjalanan saya. Waktunya putar balik kembali ke Kota Padang. Perjalanan saat ini memang sudah selesai, namun bentangan alam Andalas tak berkesudahan menawarkan panorama indah bagi pelancongnya. — aha/mh



'Bendi' di kandang kuda rumah Bung Hatta. FOTO: AGUNG



Ornamen di dalam istana. FOTO: AGUNG



## Adian Napitupulu Gemar Modifikasi Motor Tua

Anggota DPR RI Adian Napitupulu bersama koleksi motornya yang telah dimodifikasi. FOTO: ISTIMEWA

Di sela-sela padatnya aktifitas sebagai Anggota DPR RI, Adian Napitupulu punya hobi unik, memodifikasi motor-motor lama. Ia mengatakan, tujuannya untuk membuat semakin menarik dan layak untuk dikendarai.

“Saya sendiri bukan bikers, cuma senang saja. Kayak motor ini, saya modifikasi sendiri, bawa bengkel sendiri,” ujar Adian dalam kesempatan wawancara yang dilakukan *Parlementaria*

beberapa waktu lalu.

Motor yang dimaksud aktivis 1998 ini, jenis Honda Shadow 400cc keluaran 1994. Motor dimodifikasi berwarna gelap, di-*bore up* menjadi 600 cc, *full color*. Di bagian tangki depan terdapat foto lukisan wajah Adian bercorak hitam putih. Sementara di tangki bagian kiri terdapat tulisan besar ‘Sons of Democracy’.

“Beratnya hampir sama seperti Harley Davidson, karena itu dudukannya juga dibuat rendah,” ucap politisi PDI Perjuangan itu. Di depan rumah dinas DPR yang ditempati Adian, juga terlihat dua motor hasil modifikasi lain. Yaitu berjenis Yamaha Virago 535 keluaran 1995, *full paper*. Tampilannya juga menyerupai motor gede seperti Harley Davidson. Namun, dari segi

bobot jauh lebih ringan.

Motor yang ketiga lebih keren lagi. Honda GL Pro, dimodifikasi menyerupai motor-motor tua era perang dunia kedua, BSA. Tampilannya *full* berwarna hijau, lengkap dengan gandengan samping beroda satu untuk penumpang atau biasa disebut sespan.

“Ini bisa mengalihkan dari segala sesuatu yang sifatnya rutinitas. Untuk menyalurkan hobi ya tergantung sekosongnya saja. Kalau jadwal lagi kosong, bisa muter-muter kompleks menggunakan motor. Kalau waktunya lebih panjang bisa ke jalan. Paling jauh ke Depok,” katanya. Meski hasil modifikasi, Adian memastikan surat-surat motor yang terparkir di depan rumahnya lengkap. Baik STNK maupun BPKB, semuanya ada. —

tn/mh

# Marketplace Guru

Mendikbudristek Nadiem Makarim mengajukan solusi penempatan guru melalui marketplace. Dikutip dari laman *Shoper*, marketplace adalah platform di mana penjual berkumpul dan bisa menjual barang atau jasa ke pelanggan meski tanpa bertemu secara fisik.

Jika menilik dari definisi tersebut, maka *marketplace* lekat dengan urusan barang dan/atau jasa, serta proses pertukaran antara pelanggan dan penjual di dalamnya. Singkatnya, *marketplace* berkaitan dengan mekanisme pasar, di mana barang (goods) yang ada di dalamnya



Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah.

tergolong barang ekonomi (*private goods*).

"Di sisi lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Ia membutuhkan kehadiran negara-dengan berbagai upayanya-untuk dapat diwujudkan, sehingga dapat dinikmati secara luas tanpa biaya tambahan.

Karena itu, pendidikan bukan *private goods* melainkan barang publik (*public goods*). Kepemilikannya tidak bisa hanya dinikmati satu dua kelompok masyarakat. Ide Mendikbudristek menghadirkan *marketplace* guru mungkin jadi ide 'unik'. *Marketplace* guru dapat dimanfaatkan sekolah mencari pengajar yang dibutuhkan.

Para guru honorer atau yang telah lulus seleksi PPPK akan dimasukkan langsung ke ruang penyimpanan data *marketplace* guru. Namun, Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah keberatan dengan istilah itu. Pada raker dengan Mendikbud, ia menyarankan agar istilahnya menggunakan 'database' saja, bukan *marketplace*.

"Seharusnya, menjadi database saja, bukan *marketplace*.. Mungkin ada istilah lain yang bisa dilembutkan, jangan *marketplace*," tuturnya. Duh, kalau nasib pendidikan kita dibuat seperti itu, bukannya yang pintar kian pintar, tapi yang terbelakang juga tambah terpuruk. Ada-ada saja Menteri Nadiem. 🐾

rdn/mh



Mendikbudristek Nadiem Makarim.



**SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI  
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  
mengucapkan  
SELAMAT**



**HARI PENDIDIKAN NASIONAL  
2023**

